



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP Tahun **2018**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan bimbingan dan tuntunan-Nya jualah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dapat disusun dengan lancar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018 disusun sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu pula merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kaltim dan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja Kepala Bappeda Prov. Kaltim dengan Gubernur Kalimantan Timur.

Semoga LKjIP Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2016 ini, sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan pencapaian kinerja selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Bappeda Prov. Kaltim tahun 2018.

Samarinda, 25 Pebruari 2019

KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**DR. H. ZAIRIN ZAIN**  
NIP. 19590714 198611 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Visi Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018 adalah :

### **“ TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM TAHUN 2018 ” .**

Sesuai dengan visi tersebut, Bappeda Prov. Kaltim menetapkan 3 (tiga) buah misi untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu : (1) Menyusun Perencanaan yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah; (2) Melakukan koordinasi yang Efektif, Efisien Berbasis Data Statistik dan Data Spasial; dan (3) Meningkatkan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. LKjIP Bappeda Prov. Kaltim merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim yang memuat Perencanaan, Pencapaian, dan Realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang pada Renstra Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2014-2018.

IKU yang digunakan harus dapat mengukur pencapaian sasaran strategis yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam Renstra.

Selanjutnya pada RENSTRA BAPPEDA Prov. Kaltim 2014-2018 ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Berdasarkan capaian Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Prov. Kaltim tahun 2017 dijelaskan pada Tabel berikut:

### CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5	
1	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	99%	100.00%	101.01%
		Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	95%	44.78%	47.14%
		Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD	95%	100%	105%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>84.47%</b>
2	Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	100%	90%	90.00%
		Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	95%	115.00%	121.05%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>113.03%</b>
3	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	90%	154.03%	162.54%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III</b>					<b>162.54%</b>
<b>Rara-Rata Capaian Sasaran I,II,III</b>					<b>120.01%</b>

Pada Analisis Capaian dari Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut "

1. Perbandingan Indikator Kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				INDIKATOR KINERJA
1	Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	99%	100.0%	<b>101.01%</b>
2	Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	95%	44.78%	<b>47.14%</b>
3	Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD	95%	100.0%	<b>105%</b>
4	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	100%	105%	<b>105%</b>
5	Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	95%	115%	<b>121.05%</b>
6	Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	90%	154.03%	<b>162.54%</b>

2. Perbandingan Indikator Kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2016	2017	2018	
1	Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	%	100	100	100	0
2	Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	%	32.18	72.73	44.78	-559
3	Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD	%	100	100	100	0.00
4	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	70.81	85	105.00	400
5	Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	%	100	108.11	115	137.8
6	Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	%	83.52	121.64	154.41	655.4

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	%	99	100.	101.01
2	Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	%	95	44.78	47.14
3	Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD	%	95	100.	105.26
4	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	100	105.00	105.00
5	Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	%	95	115.00	121.05
6	Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	%	95	154.41	162.54

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi	
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	101.01%	90.79%	10.22%
		Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	47.14%	86.98%	-39.84%
		Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD	105%	99.45%	5.81%
2	Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	105.00%	98.01%	6.99%
		Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	121.05%	95.65%	25.40%
3	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	162.537%	98.19%	64.35%

Sasaran pertama Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran:

- a. Kinerja Prosentase RKPD, terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan Renja terhadap RKPD dengan Target 99% dan realisasi 100% diperoleh capaian sebesar 101.01%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 dengan nilai adalah 0. Untuk tingkat kemajuan tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD adalah 101.01%. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara mengurangi persentasi capaian kinerja 101.01% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90.79% sehingga tingkat efisiensi yang diperoleh 10.22%, atau efisien.
- b. Kinerja jumlah usulan APBN di kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh pusat dengan target 95% dan realisasi 44.78% dan capaian sebesar 47.14%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 dengan nilai penurunan sebesar 559%. Sedang tingkat Kemajuan indikator kinerja ini diperoleh dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran dengan target akhir renstra maka diperoleh nilai sebesar 47.14%. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara mengurangi antara persentasi capaian kinerja 47.14% dengan persentase penyerapan anggran sebesar 86.98% tingkat efisiensi yang diperoleh 39.84, atau dengan kata lain kegiatan ini tidak efisien.
- c. Indikator Kinerja Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD dimana target adalah 90% realisasi sebesar 100% dan capaian 105.26%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 dengan nilai 0, dengan kata lain indikator kinerja ini tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat Kemajuan indikator diperoleh dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan Target akhir renstra dan diperoleh nilai sebesar 105.26%. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara mengurangi antara persentasi capaian kinerja 105.26% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99.45% maka tingkat efisiensi yang diperoleh 5.81%, atau dengan kata lain kegiatan ini efisien.

Sasaran kedua Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah :

- a. Indikator Kinerja Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan dengan target 100% realisasi 105% maka capaian kinerja adalah 105%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 mengalami peningkatan 400%. Tingkat Kemajuan indikator diperoleh dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target akhir renstra dan diperoleh nilai sebesar 105%. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara mengurangi antara persentasi capaian kinerja 105% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98.01% maka tingkat efisiensi yang diperoleh 6.99%, atau dengan kata lain kegiatan ini efisien
- b. Indikator Kinerja Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan dengan target 95% realisasi 115% maka capaian kinerja adalah 121.05%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 mengalami peningkatan 137.8%. Tingkat Kemajuan indikator diperoleh dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target akhir renstra dan diperoleh nilai sebesar 121.05%. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara mengurangi antara persentasi capaian kinerja 121.05% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95.65% maka tingkat efisiensi yang diperoleh 25.40%, atau dengan kata lain kegiatan ini efisien.

Sasaran ketiga Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur :

Indikator Kinerja Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD dengan target 95% realisasi 154.41% maka capaian kinerja adalah 162.05%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 mengalami peningkatan 655.4%. Tingkat Kemajuan indikator diperoleh dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan taraget akhir renstra dan diperoleh nilai sebesar 162.54%. Tingkat efisiesi diperoleh dengan cara mengurangi antara persentasi capaian kinerja 162.537% dengan persentase penyerapan anggran sebesar 98.19% maka tingkat efisiensi yang diperoleh 64.35% atau dengan kata lain kegiatan ini efisien



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	I-1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim.....	I-2
C. Struktur Organisasi .....	I-3
D. Sumber Daya Aparatur.....	I-5
E. Aspek Strategis Bappeda Prov. Kaltim .....	I-9
F. Permasalahan Utama.....	I-10
G. Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Prov. Kaltim.....	I-12
H. Sistematika Penyajian .....	I-13
<b>BAB II PERENCANAAN PENETAPAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
A. Perencanaan Strategis 2014-2018 .....	II-1
B. Indikator Kinerja .....	II-6
C. Perjanjian Kinerja.....	II-8
D. Rencana Kinerja Tahunan.....	II-10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-1</b>
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP tahun 2018 .....	III-1
1) Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.....	III-1
2) Rekomendasi .....	III-4
3) Tindak lanjut .....	III-6
B. Capaian Kinerja BAPPEDA PROV. KALTIM Tahun 2018.....	III-7

C. Analisis Capaian Kinerja .....	III-9
Sasaran 1. Tercapainya integrase dan sinkronisasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran .....	III-9
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 .....	III-10
2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	III-10
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	III-11
4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	III-11
5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....	III-16
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	III-26
Sasaran 2. Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah .....	III-27
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 .....	III-27
2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	III-28
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	III-28
4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan penapaian pernyataan kinerja .....	III-28
5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan perencanaan kinerja.....	III-31
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	III-70
Sasaran 3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur .....	III-71
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 .....	III-72
2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan	

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	III-72
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	III-71
4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	III-73
5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....	III-81
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	III-99
D. Realisasi Anggaran	
1) Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja .....	III-108
2) Realisasi anggaran per program dan kegiatan.....	III-109
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Sumber Daya Aparatur .....	I-6
Tabel I.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	I-8
Tabel I.3	Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....	I-12
Tabel II.1.	Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran BAPPEDA Prov. Kaltim.....	II-4
Tabel II.2.	Program /Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran.....	II-5
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 .....	II-7
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	II-8
Tabel II.5.	Rencana Kerja Tahunan Berdasar DPA 2018.....	II-9
Tabel II.6	Anggaran Belanja Langsug Per Sasaran Strategi .....	II-9
Tabel II.7	Rencana Kerja Tahunan Berdasar DPA Tahun 2018.....	II-10
Tabel III.1	Nilai Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.....	III-1
Tabel III.2	Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi.....	III-6
Tabel III.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	III-8
Tabel III.3	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	III-8
Tabel III.4	Target Dan Capaian Kinerja Organisasi Bappeda Prov. Kaltim Th. 2018 .....	III-8
Tabel III.5	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018.....	III-9
Tabel III.6	Perbandingan antara realisasi tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya .....	III-9
Tabel III.7	Perbandingan realisais kinerja tahun 2018 dengan target RENSTRA .....	III-11
Tabel III.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	III-26
Tabel III.9	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 .....	III-27
Tabel III.10	Perbandingan antara realisasi tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	III-28
Tabel III.11	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RENSTRA .	III-28
Tabel III.12	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-71
Tabel III.13	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018.....	III-72
Tabel III.14	Perbandingan antara realisasi tahun 2018 dengan tahun lalu	

	dan beberapa tahun sebelumnya .....	III-72
Tabel III.15	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RENSTRA .....	III-72
Tabel III.16	Perbandingan realisasi kinerja RKPD tahun 2018 dengan target RENSTRA .....	III-73
Tabel III.17	Capaian Periode 2013-2018 Sasaran Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi .....	III-85
Tabel III.18	Capaian Periode 2013-2018 Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan.....	III-86
Tabel III.19	Capaian Periode 2013-2018 Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata..	III-87
Tabel III.20	Capaian Periode 2013-2018 Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik .....	III-87
Tabel III.21	Capaian Periode 2013-2018 Sasaran Misi 5: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim .....	III-88
Tabel III.22	Efisiensi penggunaan sumber daya .....	III-108
Tabel III.23	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	III-108
Tabel III.24	Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018.....	III-110
Tabel III.25	Realisasi Anggaran Tahun 2018 per Program Kegiatan serta prosentase.....	III-110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....	I-5
Gambar 1.2	Pejabat Struktural BAPPEDA Prov. Kaltim .....	I-6
Gambar 1.3	Staf ASN dan Tenaga Honorer/PTT Gender BAppeda Prov. Kaltim ...	I-7
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender Bappeda Prov. Kaltim .....	I-7
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat .....	I-8
Gambar 1.6	Prosentase jumlah Pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim Berdasarkan Pendidikan .....	I-9
Gambar III.1	Tampilan Aplikasi SIPPD .....	III-25
Gambar III.2	SIDATA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.....	III-33
Gambar III.3	e- Library Bappeda Provinsi Kalimantan Timur .....	III-34
Gambar III.4	Sistem One Data One MAM Bappeda Prov. Kaltim.....	III-35
Gambar III.5	Tepra Bappeda Provinsi Kalimantan timur .....	III-105
Gambar III.6	Evaluasi RENJA – PD (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur .....	III-107

LAMPIRAN



## BAB I PENDAHULUAN

### A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008. Sejak awal terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) mempunyai tugas membantu Gubernur untuk membawa Kalimantan Timur melakukan perencanaan pembinaan pembangunan daerah dan wilayah dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan. Hal itu tertuang dalam upaya untuk memantapkan stabilitas ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana, meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menyerasikan laju pertumbuhan dengan memperhatikan daerah yang terbelakang, pembangunan hukum yang terus diupayakan melalui penerangan, politik, hankam dan administrasi negara, kerjasama luar negeri yang mempunyai manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, pembiayaan dan pengendalian pembangunan dan sebagai pusat data informasi perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur.

Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, dan aspek pembinaan aparatur. Dalam hal ini BAPPEDA Prov. Kaltim melakukan koordinasi ke Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah antar Provinsi dan Pemerintah Pusat seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan merupakan suatu proses yang terintegrasi dan komprehensif dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja yang diperoleh, serta melakukan





analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian kinerja yang diperoleh adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain itu LKjIP berfungsi sebagai pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian dari sistematisasi dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah.

Dengan disusunnya LKJIP BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Mendorong BAPPEDA Prov. Kaltim didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BAPPEDA Prov. Kaltim di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPEDA PROV. KALTIM**

### **1. Kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim**

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangun Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



## 2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan melaksanakan tugas bertanggung jawab.

## 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemerintahan dan sosial budaya;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana wilayah;
7. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan



dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

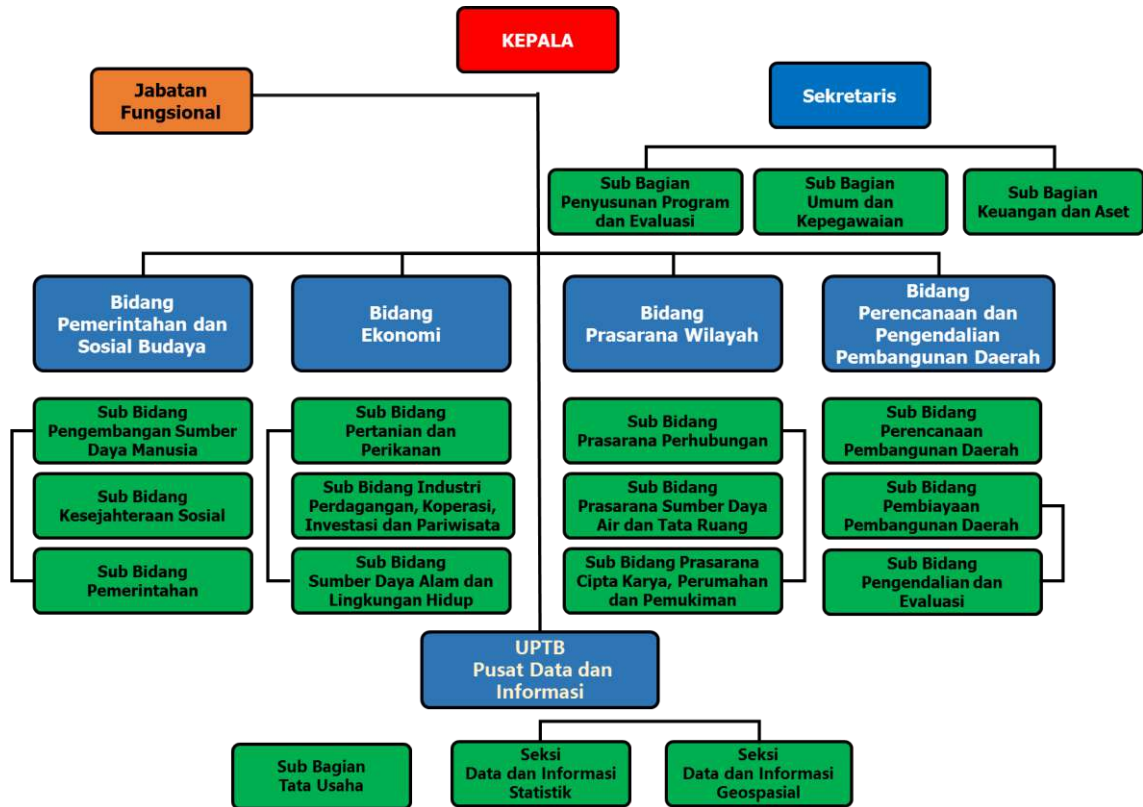
Dikarenakan masih ada penyesuaian keselarasan terkait nomenklatur jabatan yang masih dalam proses penyempurnaan antara Pusat dan Daerah maka struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada lempiran 1; Tanggal 21 Desember 2016 yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi. Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang dipimpin oleh Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial, Sub. Bidang Pemerintahan;
4. Bidang Ekonomi yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian dan Perikanan, Sub Bidang Indagkop, Investasi dan Pariwisata, Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Bidang Prasarana Wilayah yang terdiri dari Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Sub Bidang Prasana Sumberdaya Air & Tata Ruang, Sub Bidang Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman;
6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
7. Kepala UPTB Pusat Data dan Informasi terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Kasi Data dan Informasi Statistik, Kasi Data dan Informasi Spasial;



Struktur Organisasi BAPPEDA Prov. Kaltim dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

**Gambar I.1**  
**Struktur dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



#### D. SUMBER DAYA APARATUR

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.

Sampai dengan data Desember 2018, Jumlah pegawai yang bekerja BAPPEDA Prov. Kaltim sebanyak 108 (seratus delapan) orang Tenaga ASN, 69 (Enam Puluh Delapan) orang Tenaga Honor/PTT dan diantara 69 orang 15 (lima belas) orang merupakan tenaga sekuriti, Sehingga jumlah sumberdaya manusia di Bappeda sejumlah 177 orang.



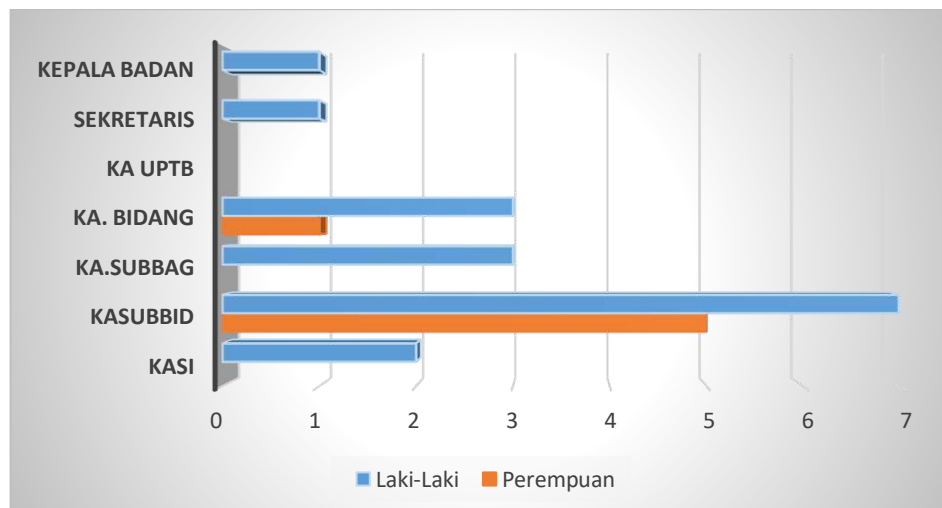
**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Sumber Daya Aparatur**

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Doktor	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kepala Badan	1		1				1						
Sekretaris	1		1					1					
Ka UPTB													
Ka. Bidang	3	1	4					2	2				
Ka.subbag	3			3					3				
Kasubbid	7	5	5	6				8	7				
Kasi	2			2				2					
staf	56	29	1	43	36	4		9	33	1	37	2	4
Jlh ASN	73	35	12	54	36	4	1	22	45	1	37	2	4
Jlh Honor/PTT	55	14						1	32	2	29	4	1
Jlh PNS + Honor/PTT	128	49	12	54	36	4	1	23	77	3	66	6	5

### Pejabat Struktural

Pejabat - Pejabat Struktural di BAPPEDA Prov. Kaltim untuk Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, sedangkan untuk Eselon IV terdiri dari 5 orang perempuan dan 12 orang laki-laki. Dari Tabel 1.1 Jumlah Sumberdaya Aparatur dapat menunjukkan bahwa keadilan kesetaraan gender sudah mendapat perhatian dalam penentuan pengambilan kebijakan di BAPPEDA Prov. Kaltim.

**Gambar I.2**  
**Pejabat Struktural Berdasar Gender**  
**BAPPEDA Prov. Kaltim**

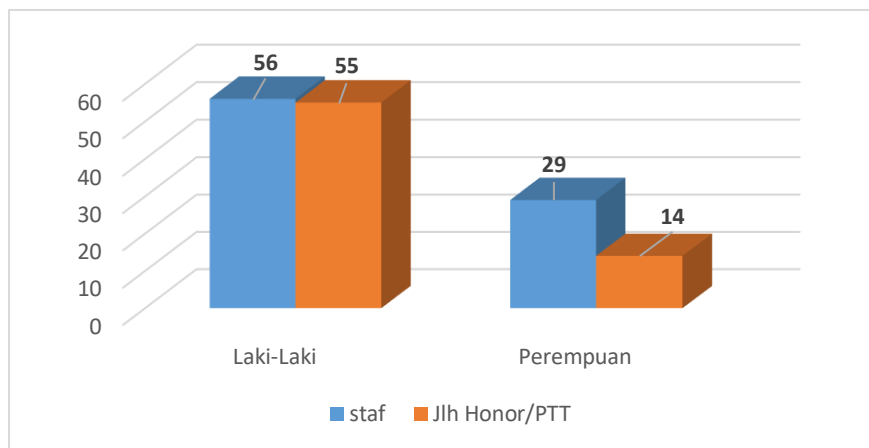




### Staf ASN dan Tenaga Honorer/PTT

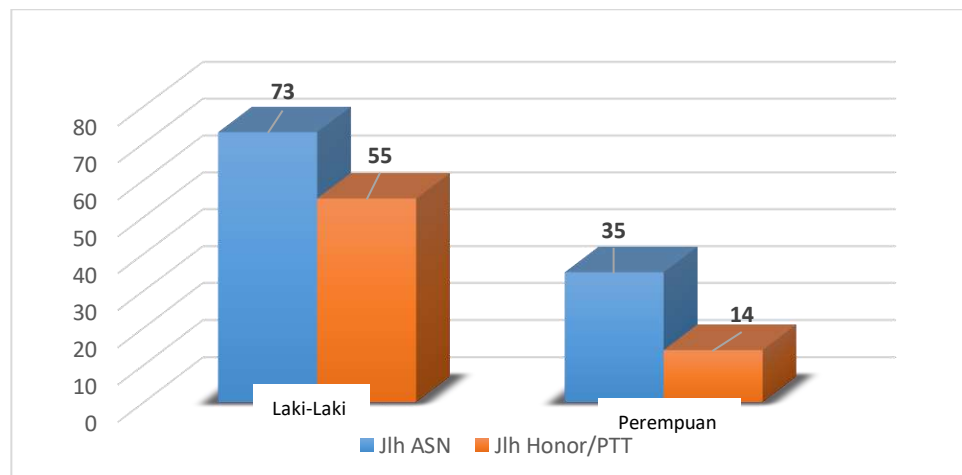
Staf ASN Perempuan berjumlah 35 dan staf ASN laki-laki berjumlah 73. Tenaga Honorer/PPT perempuan berjumlah 14 dan Tenaga Honorer/PTT laki-laki berjumlah 55. Dari Tabel 1.1 Jumlah Sumberdaya Aparatur dapat menunjukkan bahwa keadilan kesetaraan gender sudah mendapat perhatian dalam kualitas pekerjaan di BAPPEDA Prov. Kaltim.

**Gambar 1.3**  
**Staf ASN dan Tenaga Honorer/PTT Gender**  
**Bappeda Prov. Kaltim**



Pada Gambar 1.4 dapat dilihat jumlah pegawai Bappeda Prov. Kaltim baik ASN maupun Honorer/PTT berupa jumlah Pria dan Wanita berdasarkan statistik Gender Bappeda Prov. Kaltim

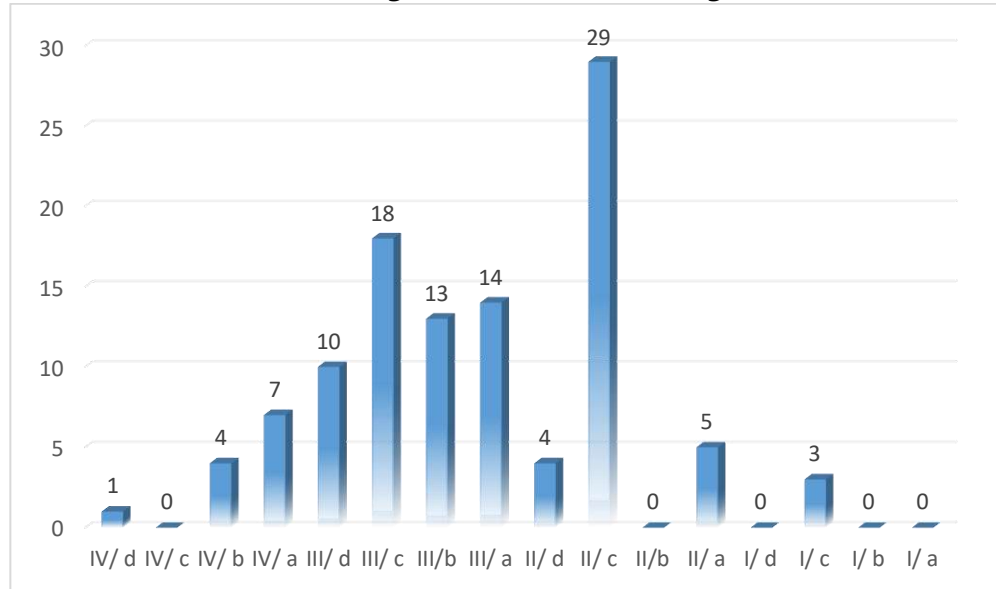
**Gambar I.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasar Gender**  
**BAPPEDA Prov. Kaltim**





Secara rinci jumlah pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada Gambar I.5

**Gambar I.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat**



Berdasarkan Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Bappeda Prov.Kaltim terhadap Pangkat IV/ d sejumlah 1 orang, IV/c 0 Orang, IV/b sejumlah 4 orang, IV/a sejumlah 7 orang, III/d sejumlah 10 Orang, III/c sejumlah 18 orang, III/b sejumlah 13 orang, III/a sejumlah 14 orang, II/d sejumlah 4 orang, II/c sejumlah 29 orang, II/a sejumlah 5 orang, I/c sebanyak 3 orang.

Jumlah pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim berdasarkan jenis untuk lulusan SD sebanyak 4 (empat) orang, lulusan SMP 3 (tiga) orang, Lulusan SMA 40 (empat puluh) orang, lulusan Sarjana Muda/Diploma Dua 3 (tiga) orang, lulusan Sarjana 39 (tiga puluh sembilan) orang, lulusan Pasca Sarjana 18 (delapan belas) orang dan Lulusan Doktoral 1 (satu) orang.

Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jenis pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.2

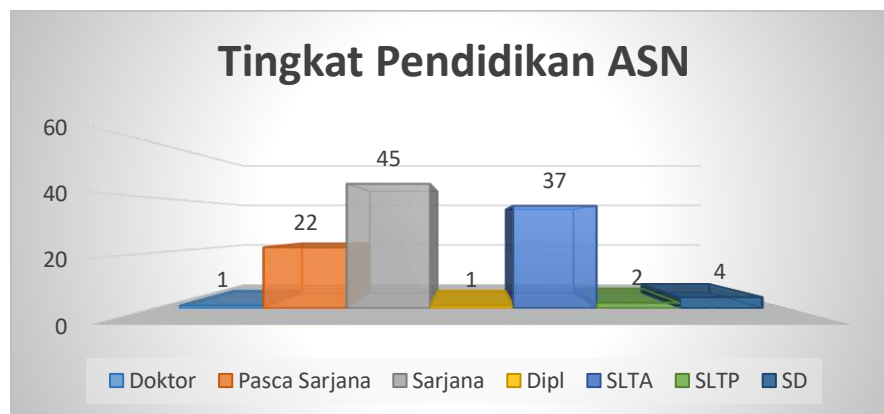
**Tabel I. 2**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Pendidikan**

Pendidikan Umum	Jumlah ( Orang )
SD	4
SMP Sederajat	2



Pendidikan Umum	Jumlah ( Orang )
SMA Sederajat	37
Diploma 3 (Sarjana Muda)	1
Sarjana	45
Pasca Sarjana	22
Doktoral	1
<b>Total</b>	<b>108</b>

**Gambar I.6**  
**Prosentase Jumlah Pegawai BAPPEDA Prov. Kaltim**  
**Berdasarkan Pendidikan**



#### E. ASPEK STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM

Kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekonsentrasi dan perbantuan. BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. BAPPEDA Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencana, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bertugas memberi penilaian atas pelaksanaan pembangunan, BAPPEDA Prov.





Kaltim harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam proses perencanaan terletak pada ketepatan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mengungkapkan permasalahan daerah tersebut. Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini membuat BAPPEDA Prov. Kaltim harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Tuntutan yang besar terhadap kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim membutuhkan dukungan dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda satu samalain sehingga BAPPEDA Prov. Kaltim harus mampu menyesuaikan diri (adaptif) dengan tuntutan pelayanan dari berbagai pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran dan kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

#### **F. PERMASALAHAN UTAMA ( ISU STRATEGIS)**

Isu stretegis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai berikut:

##### **1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim**

BAPPEDA Prov. Kaltim selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim dengan tujuan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat mewujudkan "Kaltim Sejahtera dan Berkeadilan" sesuai amanat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018. Maksud dari peningkatan kualitas BAPPEDA Prov. Kaltim adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan



karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal BAPPEDA Prov. Kaltim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

2. Peningkatan fungsi koordinasi BAPPEDA Prov. Kaltim

BAPPEDA Prov. Kaltim adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas BAPPEDA Prov. Kaltim dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim perlu untuk dibenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait.

3. Perencanaan yang matang

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

4. Evaluasi kinerja yang maksimal

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas



kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar.

5. Penyajian data yang akurat

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga input yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.

**G. SARANA DAN PRASARANA KERJA BAPPEDA PROV. KALTIM**

**Tabel I.3**  
**Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah**

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	8.700	m <sup>2</sup>
2	Bangunan Gedung terdiri :	6.525	m <sup>2</sup>
	a. Ruang Kerja	11	unit
	b. Ruang Rapat	5	unit
	c. Ruang GSCC	1	unit
	d. Ruang Server	2	unit
	e. Mushola	1	unit
	f. Ruang saji	1	unit
	g. Ruang Arsip	1	unit
	h. Kantin	1	unit
	i. Gudang	1	unit
	j. Tempat Parkir	1	unit
3	Listrik	3	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	4	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	3	Area
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman Dalam	1	Area



## H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memuat penjelasan mengenai pencapaian kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2018, dengan sistematika:

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Aspek Strategis Organisasi
- F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- G. Sarana dan Prasarana Kerja

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
- B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Capaian Kinerja lainnya (bila ada) (Misalnya Pencapaian Target MDGs atau SDGs Lingkungan Hidup)
- E. Realisasi Anggaran

### BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran



## BAB II PENCAPAIAN DAN PENETAPAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

### A. RENCANA STRATEGIS 2014-2018

Penetapan visi dan misi merupakan komponen penting dalam peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya pada BAPPEDA Prov. Kaltim. Hal ini sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja. Visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan BAPPEDA Prov. Kaltim. Korelasi dan keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan target-target pembangunan.

Seiring dengan ditetapkannya Perda Prov. Kaltim Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Prov. Kaltim, maka Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim juga ditetapkan pada tahun 2015. Pada Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim, agenda utama dalam lima tahun kedepan yakni mensukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018. Agenda utama tersebut akan dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul dalam lima tahun ke depan dimana salah satunya akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis.



Penyusunan Rencana strategis untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode berjalan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dalam daerah, dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

### **1. VISI BAPPEDA Prov. Kaltim**

Mengacu kepada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, rumusan Visi adalah sebagai berikut:

**“ TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
KALIMANTAN TIMUR 2018 “**

### **2. MISI BAPPEDA Prov. Kaltim**

Rumusan misi yang merupakan penjabaran dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- 1) Menyusun Perencanaan yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Penganggaran dan Pembangunan Daerah;
- 2) Melakukan Koordinasi yang Efektif, Efisien berbasis Data Statistik dan Data Spasial;
- 3) Meningkatkan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

### **3. TUJUAN BAPPEDA Prov. Kaltim**

Berdasarkan perumusan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut:



- 1) Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
- 2) Meningkatkan Kualitas Data/Informasi Spasial Perencana Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan Fungsi Koordinasi;
- 3) Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah

#### 4. SASARAN BAPPEDA Prov. Kaltim

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin dicapai pada periode Tahun 2014 – 2018, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mencapai tujuan 1: Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Pembangunan Daerah
  - S1) Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antara fungsi perencana dan penganggaran dengan indikator:
    - a. Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah;
    - b. Presentase integrasi pembangunan Kaltim pada Regional Kalimantan;
    - c. Presentasi Kesesuaian DPA dengan RKPD.
- 2) Untuk mencapai tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi serta Fungsi Peran Koordinasi
  - S2) Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Korrdinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator :
    - a. Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
    - b. Persentasi koordinasi perencanaan pembangunan.
- 3) Untuk mencapai tujuan 3: Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah
  - S3) Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
    - a. Presentase Pencapaian RKPD terhadap sasaran RPJMD.

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat di lihat dari Tabel II.2. berikut:



**Tabel II.1  
Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran BAPPEDA Prov. Kaltim**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2014	2015	2016	2017	2018
<b>VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALTIM TAHUN 2018</b>								
<b>MISI 1: Menyusun Perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi dengan Penganggaran Pembangunan Daerah</b>								
1	Meningkatkan Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah	90	93	95	97	99
			Presentase integrasi pembangunan Kaltim pada Regional Kalimantan	80	85	87	90	95
			Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD	70	75	80	85	95
<b>MISI 2: Melakukan Koordinasi yang Efektif, Efisien berbasis Data statistik dan Data spasial</b>								
2.	Meningkatkan Kualitas Data /Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Korrdinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	70	75	85	95	100
			Persentase koordinasi perencanaan pembangunan	64	77	83	89	95
<b>MISI 3: Meningkatkan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah</b>								
3.	Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	Tercapainya Sasaran RPJMD Prov. Kaltim	Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	60	70	80	90	95





**Tabel II.2**  
**Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran**  
**Tahun 2018**

NO	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	Prosentase konsistensi RKPd terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd	%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Penyusunan RKPd
			Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	%		b. Penyusunan RPJMD
			Persentase kesesuaian DPA dengan RKPd	%		c. Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi
						d. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
						e. Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD
						f. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan
2	Meningkatnya Kualitas Data/Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan Fungsi Koordinasi	Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	a. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral
						b. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik
			Persentase koordinasi perencanaan pembangunan	%	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
						b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan
						c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata
						a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah			b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang			



NO	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
						c Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman
					Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya	a Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						b Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
						c Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
3	Terkendalinya Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	%	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	a Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
						b Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
					Program Pelayanan Administrasi	a Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
						b Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	a Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
						b Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
					Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	a Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
						b Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

## B. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.



**Tabel II.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Tahun 2018**

1. Nama Unit Organisasi : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah
3. Fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah;
  3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi;
  4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
  5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pemerintahan dan aparatur;
  6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah;
  7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang statistik dan pengendalian pembangunan;
  8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengkajian dan pembiayaan pembangunan daerah;
  9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	ALASAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD</li> <li>2. Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat</li> <li>3. Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD</li> </ol>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>Mengukur keselarasan antar dokumen perencanaan Provinsi dan OPD</p> <p>Mengukur efektifitas peran perencanaan dalam pembangunan daerah yang dibiayai dana APBN</p> <p>Mengukur konsistensi antara perencanaan dan penganggaran</p>	<p>Perda RPJMD, Pergub RKPD, Renstra OPD, Renja OPD</p> <p>Buku usulan FKR2RK dan Buku Kerja FKR2RK</p> <p>Pergub RKPD dan Dokumen Anggaran (DPA)</p>	<p>Rata-rata prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD</p> <p>Prosentase Jumlah Usulan Prov. Kaltim melalui Usulan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang masuk dalam APBN</p> <p>Jumlah Program Kegiatan di DPA yang terdapat pada RKPD dibagi dengan jumlah Program Kegiatan di DPA</p>	<p>P3D</p> <p>P3D</p> <p>SEKRETARIAT</p>
2.	Tercapainya kualitas data/informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan</li> </ol>	%	Mengukur ketersediaan data dan informasi yang dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan	Dokumen Data Pembangunan Kalimantan Timur	Prosentase elemen data pembangunan yang tersedia pada SIDATA dibagi dengan total elemen data pembangunan	STADAL



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	ALASAN	SUMBER DATA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Persentase koordinasi perencanaan pembangunan	%	Mengukur peran rencana dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	Dokumen Verifikasi Rancangan Renja, Renja PD, UPPN, Daftar Absen Rakor Bappeda se-Kaltim, Konsultasi Publik, Rakor Program Prioritas, Forum PD dan Musrenbang RKPDP	Prosentase rata-rata dari penjumlahan pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi perencanaan pembangunan	EKONOMI, PPW, P-SDM, PA

### C. PERJANJIAN KINERJA

**Tabel II.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah	99
		Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan	95
		Persentase kesesuaian DPA dengan RKPDP	95
2	Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	100
		Persentase koordinasi perencanaan pembangunan	95
3	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pencapaian RKPDP terhadap Sasaran RPJMD	95

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. PROGRAM PRIORITAS</b>		<b>18,338,910,000</b>	
1	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	1,942,250,000	APBD
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	2,032,000,000	APBD
3	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2,564,260,000	APBD
5	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	2,405,000,000	APBD
6	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	2,180,000,000	APBD
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7,215,400,000	APBD
<b>B. PROGRAM PENDUKUNG</b>		<b>15,396,056,228</b>	
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,192,460,000	APBD
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,403,290,228	APBD
10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3,509,906,000	APBD
11	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	290,400,000	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>33,734,966,228</b>	



1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Bappeda Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.42,638,377,000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp.47,458,683,228,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.13,703,717,000,- dan Belanja Langsung Rp.13,703,717,000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.44,790,960,090,- (94.38%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp.12,885,873,682,- (94.03% belanja langsung sebesar Rp.31,905,086,408,- (94.52%).

2. Target Belanja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018

**Tabel II.5**

**TARGET BELANJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2018**

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	13,703,717,000	12,885,873,682	94.03%
2	Belanja Langsung	33,754,966,228	31,905,086,408	94.52%
Jumlah		47,458,683,228	44,790,960,090	94.38%

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Bappeda Prov. Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel II.6**

**ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGI**

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	7,215,400,000	39.30%	Anggran ini terkait perencanaan dan penganggaran
2	Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8,579,250,000	46.73%	Anggran ini terkait kualitas data dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
3	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	2,564,260,000	13.97%	Anggaran ini terkait evaluasi RPJMD tahun 2013-2018

Berdasarkan DPA Bappeda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2018



## D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Tabel II.7**  
**Rencana Kerja Tahunan**  
**Berdasar DPA Tahun 2018**

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		
-1	-2	-3	-4	(5)		
				<b>7,215,400,000</b>		
1	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	Prosentase konsistensi RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	97%	<b>1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>7,215,400,000</b>	
			a.	Penyusunan RKPD	910,000,000	
			b.	Penyusunan RPJMD	2,550,000,000	
		Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	90%	c.	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	1,105,000,000
	d.			Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	170,000,000	
	e.			Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	1,799,000,000	
	Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD	85%	f.	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	681,400,000	
				<b>8,579,250,000</b>		
2	Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	95%	<b>2 Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial</b>	<b>1,942,250,000</b>	
			a.	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	1,375,450,000	
			b.	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	566,800,000	
				Persentase koordinasi perencanaan pembangunan	89%	<b>3 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>
	a.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	773,800,000			
	b.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	622,000,000			
		Persentase koordinasi perencanaan pembangunan	89%	c.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	636,200,000
				<b>4 Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah</b>	<b>2,200,000,000</b>	
	a.			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	1,129,500,000	
	b.			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	593,100,000	
			c.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	477,400,000	



SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	
-1	-2	-3	-4	(5)	
				<b>7,215,400,000</b>	
			<b>5 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Sosial Budaya</b>	<b>2,405,000,000</b>	
			a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	592,300,000	
			b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	643,400,000	
			c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	1,169,300,000	
				<b>2,564,260,000</b>	
3	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	90%	<b>6 Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2,564,260,000</b>
			a. Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	1,710,260,000	
			b. Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	854,000,000	
				<b>15,396,056,228</b>	
			<b>7 Program Pelayanan Administrasi</b>	<b>6,192,460,000</b>	
			a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	6,192,460,000	
			<b>10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>5,403,290,228</b>	
			a. Penyediaan Peralatan sarana dan Prasarana	2,569,459,528	
			b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	2,833,830,700	
			<b>11 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>3,509,906,000</b>	
			a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	3,459,906,000	
			b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	
			<b>12 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>290,400,000</b>	
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	212,000,000	
			b. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	78,400,000	



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN 2018

##### 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel III-1

##### Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	2.96	22.66	25.01
2	Pengukuran Kinerja	25%	18.91	19.38	19.38
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.84	11.68	11.95
4	Evaluasi Kinerja	10%	7.29	5.70	6.94
5	Capaian Kinerja	20%	12.18	13.51	14.42
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	100%	<b>73.17</b>	<b>72.93</b>	<b>77.69</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

#### Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran agar melakukan perbaikan SAKIP sebagaimana yang direkomendasikan, sebagai berikut :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja :

Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30.00 memperoleh nilai atau skor sebesar 25,1 dengan rincian sebagaimana berikut :

a.1. Dokumen Renstra memperoleh 8.31 dari maksimal nilai 10.00 yang terdiri dari :

1. Pemenuhan Renstra memperoleh nilai 2.00 dari nilai 2,00
2. Kualitas Renstra memiliki nilai 4.06 dari nilai maksimal 5.00
3. Implementasi Renstra memperoleh nilai 2.25 dari nilai maksimal 3.00

a.2. Dokumen Rencana Kerja Tahunan memperoleh nilai 16.70 dari nilai maksimal 20.00 yang terdiri dari :





1. Pemenuhan RKT memperoleh nilai 16,70 dari nilai maksimal 4.00
2. Kualitas RKT memperoleh nilai 8.50 dari nilai maksimal 10.00
3. Implementasi RKT memperoleh nilai 4,20 nilai maksimal 6.00

Hal ini disebabkan :

- Target kinerja yang diperjanjikan belum dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan.
- Pemanfaatan Rencana Aksi terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindak nyata selanjutnya.

b. Dokumen Rencana Kerja Tahunan :

Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 25.00 memperoleh nilai atau skor sebesar 19.38 dengan rincian sebagaimana berikut;

- b.1. Pemenuhan Pengukuran memperoleh nilai 5,00 dari nilai maksimal 5.00
- b.2. Kualitas pengukuran memperoleh nilai 10.63 dari nilai maksimal 12.5
- b.3. Implementasi penilaian memperoleh nilai 3.75 dari nilai maksimal 7.5 hal

ini disebabkan ;

Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulia dari setingkat Eselon IV keatas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* bagi pejabat/pegawai berkinerja yang mencapai target tepat waktu dengan yang tidak mencapai target tepat waktu.

- Pengukuran Kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai dengan eselon III dan IV.

c. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja :

Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15.00 memperoleh nilai atau skor sebesar 11.95 dengan rincian sebagai berikut :

- c.1. Pemenuhan Laporan memperoleh nilai 3.00 dari nilai maksimal sebesar 3.00
- c.2. Menyajikan informasi kinerja memperoleh nilai 6.25 dari nilai maksimal 7.5



Hal ini disebabkan laporan kinerja masih sebatas info tentang upaya efisiensi yang dilakukan belum tentang efisiensi yang telah dilakukan.

c.3. Pemanfaatan informasi Kinerja memperoleh nilai 2.70 dari nilai maksimal 4.5

Hal ini disebabkan :

- Informasi yang disajikan belum menyeluruh (sebagian) untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan
- Informasi yang disajikan hanya sebagian digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- Informasi yang disajikan hanya sebagian digunakan untuk peningkatan kinerja
- Informasi yang disajikan hanya bersifat sebagian digunakan untuk menilai kinerja

d. Evaluasi dan Evaluasi Internal

Evaluasi internal dengan bobot penilaian sebesar 10.00 memperoleh nilai atau sebesar 6.94 dengan rincian sebagai berikut :

d.1. Pemenuhan evaluasi kinerja/internak memperoleh nilai 1.59 dari maksimal 2.00

Hal ini disebabkan hasil evaluasi telah dilaksanakan dan dibahas dengan pihak yang dievaluasi namun belum sampai tahapan kesepakatan terhadap tindaklanjutnya.

d.2. Kualitas evaluasi /kinerja memperoleh nilai 3,48 dari nilai maksimal 5.00

Hal ini disebabkan :

- Pemantauan rencana aksi baru dilakukan secara semesteran dalam rangka pengendalian kinerja
- Pemantauan rencana aksi telah ada penilaian terhadap aksi yang dilakukan namun belum ada memberikan alternatif perbaikan untuk dapat dilaksanakan

d.3. Pemanfaatan evaluasi/kinerja mencapai nilai 1.88 dari maksimal nilai 3.00

Hal ini disebabkan hasil evaluasi rencana aksi baru sebagian telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.



Evaluasi internal Tahun 2016 mendapat nilai 5.70 sedang tahun 2018 mendapat nilai 6,94 sehingga terjadi kenaikan nilai 1,24 yang disebabkan oleh evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dilakukan secara periodik, pelaksanaan rencana aksi dilakukan dalam rangka pengendalian kinerja, pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan dan hasil rekomendasi rencana aksi telah ada ditindak lanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata walaupun belum optimal.

e. Evaluasi atas capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

e.1. Kinerja yang dilaporkan (*output*) memperoleh nilai 5.50 dari nilai maksimal 7.5

Rincian Penilaian tersebut sebagai berikut :

- Target dapat dicapai mendapat nilai 2.00
- Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya mendapat nilai 1.5
- Informasi kinerja dapat di andalkan mendapat nilai 2.00

e.2. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) memperoleh nilai 8,92 dari nilai maksimal 12.5

Rincian penilaian tersebut sebagai berikut :

- Target dapat dicapai mendapat nilai 2.00
- Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya mendapat nilai 1.49
- Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan mendapat nilai 3.61

## 2. Rekomendasi

a. Perencanaan Kinerja

Implementasi Perencanaan Kinerja tahunan supaya :

- Target kinerja yang diperjanjikan apabila telah terdapat bukti cukup, agar dapat dijadikan dasar pengukuran dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan untuk memberikan penghargaan (*reward*)
- Rencana Aksi dimanfaatkan tidak terbatas untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan namun agar diikuti tindakan yang nyata



b. Pengukuran Kinerja

Implementasi Pengukuran Kinerja :

- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setinggi eselon IV keatas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* terhadap pejabat/pegawai yang berkinerja baik dan tepat waktu dan pejabat/pegawai yang tidak jelas kinerjanya
- Pengukuran Kinerja atas rencana aksi agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

- Penyajian informasi supaya tidak hanya info tentang usaha efisiensi yang dilakukan namun menyajikan info tentang efisiensi yang telah dilakukan terhadap penggunaan sumberdaya
- Informasi yang disajikan digunakan bersifat ekstensif dan menyeluruh untuk peningkatan kinerja
- Informasi yang disajikan digunakan bersifat ekstensif dan menyeluruh untuk penilaian kinerja.

d. Evaluasi internal

Pemenuhan evaluasi supaya

- Hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta dibuatkan kesepakatan tindaklanjutnya

Kualitas evaluasi agar

- Pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
- Pemantauan rencana aksi memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.



2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel III-2

Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
1.	<b>Perencanaan Kinerja</b> Pekerjaan yang dilakukan berdasar pada Target Kinerja guna melakukan pengukuran menghasilkan evaluasi dan capaian yang dapat dijadikan tolak ukur kegagalan ataupun keberhasilan	Dalam pelaksanaannya Rencana Aksi telah dimanfaatkan dengan luas atau tidak terbatas baik terhadap indikator Sasaran RENSTRA yang memuat sasaran Renstra, Indikator Kinerja dan Target indikator, memuat pula program ( <i>outcome</i> ) serta kegiatan ( <i>output</i> ) dan rencana anggaran.	Rencana Aksi telah menggambarkan isi keseluruhan SAKIP dan menjadi panduan secara luas dalam pelaksanaan SAKIP.
2.	<b>Pengukuran Kinerja</b> Hasil Pengukuran (Capaian) Kinerja selalu menjadi dasar pemberian <i>reward</i> dan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN pasti mendapatkan <i>Punishment</i> , bila <i>reward</i> tidak disertakan dengan surat tertulis namun dilaksanakan dengan memberikan perjalanan dinas, sedang pelanggaran dilakukan dengan pemanggilan, penenguran pemotongan gaji dan insentif sampai surat peringatan 1 hingga surat peringatan 3.	Pelaksanaannya Pengukuran Kinerja atas rencana Aksi dilakukan secara berkala dengan jangka waktu setiap triwulan dan hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk memantau apakah kegiatan dilakukan dengan benar atau terdapat halangan hingga dapat diambil tindakan dalam	Rencana Aksi pada pengukuran kinerja Dilaksanakan dengan melakukan pengukuran pada indikator kinerja yang dijabarkan dalam bentuk uraian kata pada analisis capaian kinerja
3.	<b>Pelaporan Kinerja</b> Selain menyajikan Informasi efisiensi, namun telah pula mengajukan informasi tentang eksistensi walau masih secara makro dan akan dipertajam pada laporan mendatang	Dalam pelaporan informasi yang disajikan masih bersifat makro dan belum bersifat ekstensif dan akan diperbaiki pada laporan mendatang guna peningkatan penilaian kinerja	Melaksanakan evaluasi, realisasi hingga capaian dan realisasi keuangan dan silpa serta laporan koordinasi kegiatan dan dokumen pendukung sebagai



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
			implementasi laporan
4.	<b>Evaluasi Internal</b> Pembuatan dan Pemantauan Rencana Aksi digunakan untuk memantau kinerja dan mengendalikan Kinerja tapi tidak kepada realisasi dan capaian dan juga memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan.	Pembuatan dan Pemantauan Rencana Aksi digunakan untuk memantau kinerja dan mengendalikan Kinerja tapi tidak kepada realisasi dan capaian dan juga memberikan alternatif perbaikan yang dilaksanakan	Rencana Aksi terhadap Evaluasi Internal

## B. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2018

BAPPEDA Prov. Kaltim telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2018 merupakan tahun IV dari Pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013 – 2018.

Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010 yaitu:

**Tabel III-3**

**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Keterangan : berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

**Tabel III-4**

**Target Dan Capaian Kinerja Organisasi  
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018**

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULANAN	TARGET	REALISASI	%
1 Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	Prosentase konsistensi RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	%	99	TRIWULAN I	60	60	100%
				TRIWULAN II	39	50	111.11%
				TRIWULAN III			
				TRIWULAN IV			
	Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	%	95	TRIWULAN I			
				TRIWULAN II	95	44.78	47.14
				TRIWULAN III			
				TRIWULAN IV			
	Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD		95	TRIWULAN I			
				TRIWULAN II			
				TRIWULAN III			
				TRIWULAN IV	95	100	105.26%
2 Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	100	TRIWULAN I	20	20	100%
				TRIWULAN II	20	25	112.5%
				TRIWULAN III	20	35	133.33%
				TRIWULAN IV	40	25	105%
	Persentase koordinasi	%	95	TRIWULAN I			
				TRIWULAN II	10	15	150%



SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULANAN	TARGET	REALI SASI	%
	perencanaan pembangunan			TRIWULAN III	25	30	128.57%
				TRIWULAN IV	60	70	121.05%
3 Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	%	95	TRIWULAN I			
				TRIWULAN II			
				TRIWULAN III			
				TRIWULAN IV	95	154.41	162.54%

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Prov, Kaltim

**Kuantitatif**, Indikator kuantitatif berupa angka (angka atau persentase nilai dollar, tonase, adalah contohnya). Indikator kualitatif merupakan observasi deskriptif Meskipun indikator kuantitatif tidak selalu lebih obyektif, ketepatan/presisi angka mereka cenderung membuat adanya kesepakatan tentang penafsiran data hasil, sehingga biasanya lebih disukai. Namun, meskipun suatu indikator kuantitatif yang efektif telah digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka-angka dan persentase, dengan kekayaan informasi yang membuat hasil program menjadi lebih hidup.

Dari Tabel III.4 dapat dilihat target, realisasi dan capaian kinerja organisasi Bappeda Prov. Kaltim tahun 2018 yang menggambarkan perkembangan realisasi dan capaian pada periode setiap triwulan dan realisasi yang dicapai pada akhir triwulan (realisasi Tahunan).

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

**Tujuan 1. Meningkatkan konsistensi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah dengan Target 96.33% dan realisasi 81.59% maka capaian pada tujuan ini adalah 84.47%**

**Sasaran 1. Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran**





## 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

**Tabel III-5**  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja  
Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	99%	100%	<b>101.01%</b>
2	Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	95%	44.78%	<b>47.14%</b>
3	Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD	95%	100%	<b>105%</b>

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel III-6**  
Perbandingan antara realisasi Tahun 2018 dengan tahun  
lalu dan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan
			2016	2017	2018	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	$7 = \frac{(6-5)}{5} \times 100\%$
1	Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	%	100	100	100	0
2	Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	%	32.18	72.73	44.78	-559
3	Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD	%	100	100	100	0.00



**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

**Tabel III-7**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RENSTRA**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase RKPd terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd	%	99	100	101.01
2	Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	%	95	44.78	47.14
3	Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPd	%	95	100	105.26

**4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

**Sasaran pertama;** Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran

**Indikator Kinerja 1.** Prosentase RKPd terhadap RPJMD, RENSTRA terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd

**- Keberhasilan/kegagalan**

- Perhitungan Indikator Kinerja masih dilakukan secara perbandingan antara RKPd terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan Renja terhadap RKPd, diperkuat dengan data dasar dari aplikasi SIPPD dan *Bridgesystem*
- Dengan nilai keseluruhan rata-rata prosentase RKPd terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd dengan realisasi 100% dan capaian 101.01% yang berarti capaian kinerja Sangat Tinggi.
- Indikator Kinerja Prosentase RKPd terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd tahun 2018 perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



tidak mengalami peningkatan dan penurunan pada capaian kinerja dan realisasi kinerja. Karenakan proses penginputan dan pengolahan dari RPJMD, RENTSTRA, RENJA dan RKPd terkait satu dan lain melalui sistem baik SIIPPD, Bridgesystem dan SIMDA apabila terdapat program atau kegiatan diluarnya sistem akan membaca error dan tidak dapat dianggarkan.

- **Peningkatan/penurunan**

- a. Indikator Kinerja Prosentase RKPd terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd dimanan target 99%, dan realisasi 100% maka capaian kinerja adalah 101.01%.
- b. Indikator Kinerja Prosentase RKPd terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd tahun 2018 untuk memperoleh peningkatan/penurunan maka dilakukan perbandingan terhadap realisasi 2018 (100%) dengan realisasi 2017 (100%) maka diperoleh senilai 101.01%, atau dengan kata lain tidak ada peningkatan maupun penurunan.
- c. Indikator Kinerja Prosentase RKPd terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd untuk mencapai tingkat kemajuan diperoleh dengan membandingkan realisasi 2018 (100%) dengan target akhir renstra (99%) maka diperoleh tingkat kemajuan senilai 101.01%.

- **Alternatif solusi**

Indikator ini menggambarkan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang terkoordinasi secara baik dan tercatat melalui sistem yang saling sinergis antara Perencanaan, Penganggaran dan Realisasi anggaran yang tercatat pada SIIPPD, *Bridgesystem* dan SIMDA, sehingga pengawasan terhadap pencapaian keselarasan RPJMD, RENTSTRA, RKPd, RENJA dapat terwujud.

**Indikator Kinerja 2.** Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat

- **Keberhasilan/kegagalan**

- a. Perhitungan indikator kinerja berupa jumlah anggaran APBN yang diterima per jumlah APBN yang diusulkan dikali seratus persen



- a. Maka keseluruhan Jumlah Usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan jumlah usulan anggaran adalah Rp.18,511,385,646,000 sedang yang diakomodir Rp. 8,288,815,995,000,- dengan demikian realisasi sebesar 44.78% dan capaian sebesar 47.14%. Sedang tahun 2017 Provinsi Kaltim sebesar Rp.11.096.684.000.000,- dan Anggaran APBN tahun 2017 yang diterima Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.8.070.454.464.000, Ini mengakibatkan persentase kinerja tahun 2017 sebesar 72.73% dengan prosentase capaian sebesar 80.81%.
  - b. Pada indikator kinerja tahun 2018 Prosentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan mengalami penurunan realisasi dan capaian dibandingkan tahun 2017 namun secara keseluruhan besar anggaran APBN yang diusulkan lebih besar dari tahun sebelumnya dan anggaran APBN yang diterima Prov. Kaltim pun lebih besar dari tahun 2017.
  - c. Dengan kata lain usulan anggaran APBN tahun 2018 dari Prov. Kaltim secara keseluruhannya lebih besar dari anggaran APBN tahun 2017 dan anggaran APBN yang diterima tahun 2019 lebih dari tahun 2018.
- **Peningkatan/penurunan**
- a. Indikator Kinerja Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat dimana target 95% dengan realisasi 44.78% maka capaian indikator kinerja adalah 47.14% dengan kata lain capaian indikator ini adalah sangat rendah.
  - b. Indikator Jumlah usulan APBN di kaltim yang diakomodir oleh Pemerintah pusat tahun 2018 adalah 44.78% dan capaian sebesar 47.14 %. tahun 2018 mengalami penurunan secara realisasi dan capaian dikarenakan anggaran yang diusulkan lebih besar dari tahun 2017 dan anggaran yang diterima tahun 2018 pula lebih besar walupun tidak terlalu jauh dari tahun 2017 (dengan realisasi 72.73% lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar 32.18% dan 17.89%. )
  - c. Indikator Kinerja Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh untuk memperoleh peningkatan/penurunan maka dilakukan perbandingan



terhadap realisasi 2018 (44.78%) dengan realisasi 2017 (72.73%) maka diperoleh penurunan sebesar 59%. Penurunan ini jua terjadi dikarenakan walau nilai realisasi 2017 lebih rendah dari 2018 namun usulan tahun 2017 pun tidak sebesar usulan tahun 2018. Dimana besar perbedaan usulan adalah 59.95%.

- d. Indikator Kinerja Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat untuk mencapai tingkat kemajuan diperoleh dengan membandingkan realisasi realisasi 2018 (44.78%) dengan target akhir renstra (95%) maka diperoleh tingkat kemajuan senilai 47.14%.

- **Alternatif solusi**

- a. Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) adalah forum kerjasama yang terbentuk karena adanya kebutuhan dan keyakinan bersama akan perlunya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Regional Kalimantan dalam bidang konektivitas, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, industri dan pariwisata, kemaritiman dan perbatasan serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Usulan dari daerah mengacu pada RPJMN (NAWACITA) guna tercipta keselarasan Pusat, Daerah hingga Kab/Kota;
- c. Penyusunan rumusan isu-isu strategis dan program Regional Kalimantan setiap tahun melalui tahapan-tahapan hingga Musrembang Regional, Audensi kepresiden, hingga *roadshow* kementerian/lembaga.
- d. Rangkaian kegiatan Pengusulan Anggaran melalui APBN dilaksanakan melalui forum regional Kalimantan, dan musrembangnas, kegiatan dilaksanakan pada triwulan I dan II.
- e. Dalam mengajukan kegiatan dan anggaran diperlukan data yg lebih akurat
- f. Perlunya campurtangan pemerintah provinsi dalam menyeleksi anggaran yang diusulkan sehingga usulan yang dikirim tidak berupa gelondongan dan begitu besar 50% dari anggaran yang diterima.



### **Indikator Kinerja 3.** Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD

#### - **Keberhasilan/kegagalan**

- a. Kinerja Indikator Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD tahun 2018 dilakukan melalui sistem dan terdapat kesesuaian DPA dengan RKPD
- b. Dengan nilai keseluruhan rata-rata prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD adalah 100%
- c. Pada tahun 2018, BAPPEDA Prov. Kaltim telah berhasil menjaga konsistensi kesesuaian APBD Prov. Kaltim Tahun 2018 dengan RKPD Tahun 2018, bahkan dalam 5 (lima) tahun Renstra 2013-2018 sehingga proses perencanaan dan penganggaran terletak pada Konsisten perencanaan dan penganggaran itu sendiri. Lebih lanjut adanya system yang telah dimiliki Prov. Kaltim berupa SIPPD, *Bridgesystem*, dan SIMDA mencegah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak sejalan antara perencanaan dan penganggaran hingga DPA. Hal ini menjadikan realisasi untuk indikator ini memperoleh nilai maksimum yaitu 100% dengan capaian sebesar 105%.

#### - **Peningkatan/penurunan**

- a. Indikator Kinerja Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD dimana target 95% dengan realisasi 100.00% maka capaian indikator kinerja adalah 105% dengan kata lain capaian indikator ini adalah sangat tinggi.
- b. Indikator Kinerja Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD untuk memperoleh untuk memperoleh peningkatan/penurunan maka dilakukan perbandingan terhadap realisasi 2018 (100%) dengan realisasi 2017 (100%) maka diperoleh nilai 0 (nol) yang berarti indikator ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.
- c. Indikator Kinerja Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD untuk mencapai tingkat kemajuan diperoleh dengan membandingkan realisasi realisasi 2018 (100%) dengan target akhir renstra (95%) maka diperoleh tingkat kemajuan senilai 100.26%.



- **Alternatif solusi**

- a. Kinerja Indikator Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD diharapkan tetap terus konsisten dan peningkatan sistem dalam pelaksanaannya.
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan pula dihimbau untuk melaksanakan kegiatan diatas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

**Sasaran pertama;** Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran

**Indikator Kinerja 1.** Prosentase RKPD terhadap RPJMD, RENSTRA terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD

a. Penyusunan RKPD

Sebagai penjabaran dari pelaksanaan Revisi RPJMD tahun terakhir maka RKPD Tahun 2018 merupakan satu satunya dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Disusunnya RKPD 2018 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengacu pada arah pembangunan yang temuat pada Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018.

Rumusan RKPD Prov. Kaltim tahun 2018 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun 2018 termasuk penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Pelapon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018. RKPD juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kaltim diperlukan guna memperhatikan keselarasan dengan RPJMD Prov. Kaltim maupun Rencana Pembangunan Nasional. Maka tahapan penyusunan RKPD Prov. Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD Prov. Kaltim
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltim
3. Penyusunan Rancangan RKPD Prov. Kaltim



4. Pelaksanaan Musrembang RKPD Prov Kaltim
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Prov. Kaltim
6. Penetapan RKPD Prov. Kaltim

Dalam dokumen RKPD memperhatikan pula hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Gambaran kondisi daerah
2. Evaluasi Kinerja Tahun sebelumnya
3. Permasalahan dan Isu Strategis pembangunan Daerah
4. Arah kebijakan Ekonomi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
5. Tujuan dan sasaran yang tak lepas dari RPJMD dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional
6. Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah
7. Kerangka Indikator Kinerja Pembangunan RKPD Tahun 2018
8. Aspek Teknokratik dan Aspek Bottom-Up

b. Penyusunan RPJMD

Dalam rangka peningkatan sinergis, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Prov. Kaltim tersebut, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dijabarkan dalam dokumen ini. Merujuk pernyataan sebelumnya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus menyusun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Alasan utama perlunya dilakukan perubahan RPJMD adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019), terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang





Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, serta kinerja ekonomi global yang cenderung menurun dan berdampak kepada kapasitas fiskal dan pembiayaan target pembangunan. Laporan pengendalian dan evaluasi juga menunjukkan bahwa target kinerja RPJMD banyak tidak terwujud, yang antara lain disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah sesuai dengan yang direncanakan. Alasan lain yang tak kalah penting dan melandasi dilakukannya perubahan adalah karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perubahan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di beberapa bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana antara lain dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Tahun 2018 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan periode RPJMD tahun 2013-2018, berkaitan dengan kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembuatan Dokumen RPJMD Tahun 2018-2019 Provinsi Kalimantan Timur, maka dilaksanakanlah :

- **Penyusunan Kajian Awal Rancangan Teknokratik RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2018-2023** ( Pedoman / Panduan Penyusunan Visi Dan Misi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.) Buku ini merupakan panduan atau arahan dalam penyusunan Visi-Misi bagi para calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan melakukan pencalonan sebagai Kepala Daerah yang baru di tahun 2018. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum Kalimantan Timur hingga saat ini, memberikan analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, dan memberikan arahan visi dan misi, tujuan, dan sasaran prioritas/strategis, arah kebijakan, dan program unggulan lima tahun kedepan.
- **Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2018-2023 (31 Oktober 2018)**

Konsultasi Publik ini menegaskan persoalan pembangunan Kaltim, berupa masukan untuk program pembangunan Kaltim yang lebih baik,



perumusan strategis dalam RPJMD untuk lima tahun ke depan dan dituangkan dalam program program tahunan, Pembangunan kesejahteraan rakyat, pembangunan juga berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian dengan pembangunan jalan produksi pertanian maupun hal lain.

- **Musrembang RPJMD**

Musrembang RPJMD diadakan satu hari dan satu hari dilaksanakan desk untuk menyelaraskan kegiatan baik OPD ditingkat Provinsi dan Kab/Kota.

- **Evaluasi RPJMD**

c. Penyelenggaraan MUSREMBANG Provinsi

Musrembang Provinsi dibagi dalam tiga tahapan yaitu

**1. Rakor Program Prioritas**

Pelaksanaan Rakor Program Prioritas Kaltim Tahun 2018 dilaksanakan tanggal 22 -27 Maret 2018. Sebagai forum yang sangat strategis dan dapat menentukan arah kebijakan pembangunan yang bermuara pada penetapan program, prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

Kegiatan Rakor Program Prioritas dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Bappeda Prov. Kaltim dengan masing-masing Perangkat Daerah yang berkoordinasi langsung pada Bidang Perencana dan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Rakor Program Prioritas ini dihadiri kurang lebih 500 orang.

Pelaksanaan Rakor Program Prioritas Kaltim Tahun 2018 merupakan forum yang sangat strategis dan dapat menentukan arah kebijakan dan pembangunan yang bermuara pada penetapan program prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Dengan tema "Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan Yang Adil dan Merata" RKPD Kalimantan Timur di Tahun 2018 mengandung makna bahwa pembangunan daerah memprioritaskan pada program-program yang mengarah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian kita bersama agar Visi



RPJMD Kaltim 2013-2018 dapat terwujud.

Tema RKPD Tahun 2018 mengandung pengertian bahwa pembangunan perekonomian daerah diarahkan pada optimalisasi dan integrasi belanja pembangunan baik yang bersumber dari belanja pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak langsung dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Dengan terintegrasinya belanja pemerintah, swasta dan masyarakat maka diharapkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kaltim semakin baik kedepannya.

## **2. Forum SKPD**

Forum SKPD dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan amanat Permendagri 54 Tahun 2010 penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan tahapan, yaitu; Rakor Bappeda se Kaltim, Konsultasi Publik, Rakor Prioritas; Forum SKPD. Tujuan Forum SKPD adalah untuk menyelaraskan program/kegiatan prioritas SKPD dan usulan Kabupaten Kota yang akan masuk dalam renja SKPD provinsi hasil pembahasan rakor Program Prioritas

Pembahasan program dalam Forum SKPD Provinsi; a. Penyelarasan program & kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kab/kota, b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Provinsi, c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Provinsi. Sub kegiatan ini dihadiri kurang lebih 450 orang



### 3. Musrembang RKPD

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Bappeda Prov. Kaltim menyelenggarakan MUSREMBANG tahun 2018 di Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan pada 16 April 2018.

Hal penting pada musrembang RKPD ini bahwa RKPD 2019 merupakan RKPD masa transisi mengingat bahwa RPJMD 2013-2018 akan segera berakhir. Berkaitan dengan hal tersebut penyusunan RKPD 2019 saat ini tetap mengacu pada RPJPD 2005-2025 dan hasil Evaluasi capaian Kinerja 2018 serta Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi masa mendatang baik di daerah, regional, nasional maupun global.

Penyusunan RKPD tahun 2019 ini merupakan langkah strategis dan merupakan rangkaian terencana dari upaya membangun fundamental ekonomi daerah yang kuat berbasis sumber daya terbarukan sebagai pondasi untuk menuju Transportasi Ekonomi 2030 yang digagas Gubernur Kaltim Awang Farok Ishak sebagai salah satu wujud sumbangsih untuk mewujudkan Kalimantan Timur tumbuh menjadi daerah mandiri dan mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Peserta yang hadir kurang lebih 600 orang dari seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur DPR RI, DPD RI, Pimpinan perangkat Daerah/Lembaga Vertikal, Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kaltim, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah kab/Kota, Perguruan Tinggi, BUMD, Perbankan, Tokoh Masyarakat dll.

**Indikator Kinerja 2.** Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat

#### 4. FKRP2RK

- a. Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) adalah forum kerjasama yang terbentuk karena adanya kebutuhan dan keyakinan bersama akan perlunya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Regional Kalimantan



- dalam bidang konektivitas, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, industri dan pariwisata, kemaritiman dan perbatasan serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Forum kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2KT) terdiri dari empat kelompok POKJA yaitu ;
    - a. Pokja Tata Ruang dan LH
    - b. Pokja Infrastruktur
    - c. Pokja Perekonomian,
    - d. Pokja Sumberdaya Manusia
  - c. Dengan lima fokus pembangunan yaitu; Konektivitas, Ketahanan pangan, Ketahanan Energi , Industri dan Pariwisata, kemaritiman, Perbatasan, dan SDA dan LH
  - d. Tema Musrembang Regional Kalimantan Tahun 2018 adalah Percepatan Infrastruktur Kalimantan Menuju Pertumbuhan yang berkualitas. Dilaksanakan di Jakarta, 26 April 2018
  - e. Koordinator FKRP2RK Periode 2017-2018 Bappeda Regional Kalimantan di laksanakan oleh pengurus Provinsi Kalimantan Utara

**Indikator Kinerja 3.** Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD

5. Penyusunan KUA PPAS APBD dan APBDP

KUA PPAS dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 59 Tahun 2007, Kebijakan Umum Anggaran (KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen-dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada kepala Daerah sebagai satu pedoman dalam menyusun APBD. KUA PPAS disusun berdasarkan rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musrembang.

Kepala daerah dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang di tetap Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain :



- a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan PEMDA;
- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. Teknis penyusunan APBD
- d. Hal-hal khusus lainnya

KUA dan PPAS disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan oleh Sekda kepada Kepala Daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Selanjutnya Kepala Daerah mengajukan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulan juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Dalam penyusunan pada kurun waktu satu tahun :

**1. Penyusunan KUA 2019**

**2. Penyusunan PPAS 2019**

Rancangan Kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 telah disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019. RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun satu tahun, dengan kontribusi dari berbagai sumber dana (APBN/PHLN; APBD Provinsi; Masyarakat, dan Swasta). Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD bersumber dari dana APBD



Provinsi Kalimantan Timur sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Penyusunan PPAS mengacu pada KUA yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing SKPD.

Maksud dari penyusunan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap SKPD Provinsi Kalimantan Timur, dalam menentukan/menyusun pagu anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya

Sedang tujuan Terpenuhinya skala prioritas dan lingkungan kebutuhan masyarakat, yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian, serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.

6. Penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan Sistem informasi perencanaan melalui enam tahapan
  - a. Rancangan awal renja /rancangan awal RKPD
  - b. Rancangan RENJA/ Rancangan RKPD dilaksanakan pada Rakor prioritas pembahasan berkenaan dengan program prioritas Prov Kaltim yang melekat pada SKPD
  - c. Rancangan Renja/Rancangan RKPD dilaksanakan pada Forum Perangkat daerah, pembahasan mengenai sinkronisasi program yang telah ditetapkan pada program prioritas pada SKPD dan disinergiskan dengan program yang ada diKab/Kota
  - d. Rancangan Renja dan
  - e. Renja/RKPD.



Sistem yang digunakan pada sistem informasi perencanaan pembangunan

- Sisten Informasi Perencanaan Pembangunan Darah (SIPPD)

SIPPD adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan suatu sistem yang diharapkan mampu memaduserasikan dan mensinkronkan program prioritas Pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, konsistensi alokasi anggaran dan program prioritas, menjelaskan hubungan antara alokasi anggaran dengan output kegiatan dan outcome program, serta dapat digunakan untuk sebagai *baseline* dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah, sehingga belanja daerah efektif sebagai instrumen fiskal untuk semata-mata pelayanan dan kemakmuran rakyat.

**Gambar III.1**

**Sisten Informasi Perencanaan Pembangunan Darah (SIPPD)**

KODE	PROG / KEG	ENTRY	N-1	NH1	ST	MENU
4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.300.360.000,00	28.594.660.000,00	29.967.729.169,00	+	
2.14.15	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	2.307.250.000,00	1.822.250.000,00	0,00	+	
2.14.15.05	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	1.472.250.000,00	1.315.450.000,00	0,00	+	
2.14.15.06	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	835.000.000,00	506.800.000,00	0,00	+	
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.685.875.000,00	6.208.210.000,00	6.345.490.000,00	+	
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	10.685.875.000,00	6.208.210.000,00	6.345.490.000,00	+	
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.237.450.000,00	3.910.860.000,00	2.741.794.700,00	+	
4.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3.994.200.000,00	1.728.225.300,00	398.150.000,00	+	
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	2.538.250.000,00	2.182.634.700,00	2.182.634.700,00	+	
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	5.425.300.000,00	2.917.280.000,00	4.635.425.300,00	+	
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	4.025.300.000,00	2.867.280.000,00	2.825.425.300,00	+	
4.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.350.000.000,00	50.000.000,00	1.800.000.000,00	+	
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	526.425.000,00	207.400.000,00	207.400.000,00	+	
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	411.425.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	+	
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	115.000.000,00	78.400.000,00	78.400.000,00	+	
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	4.854.100.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	+	
4.03.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.313.900.000,00	759.800.000,00	759.800.000,00	+	





## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi.

**Tabel III-8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
			(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	Prosentase RKPd terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd	101.01%	90.79%	10.222%
		Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	47.14%	86.98%	-39.84%
		Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPd	105%	99.45%	5.81%

Berdasarkan data efisiensi penggunaan sumberdaya pada sasaran satu tercapainya integrasi dan sinkronisasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran bahwa ;

- d. Tingkat Efisiensi Kinerja Prosentase RKPd, terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan Renja terhadap RKPd dengan persentase capaian kinerja 101.01% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 90.79% maka tingkat efisiensi yang dicapai 10.22%, tingkat efisiensi ini menggambarkan bahwa kinerja ini efisien dalam pengerjaannya sebesar 10.22%.
- e. Tingkat Efisiensi Kinerja jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh pusat dengan persentase capaian kinerja sebesar 47.14% dengan persentase penyerapan anggaran adalah 89.98% maka tingkat efisiensi perencanaan adalah belum efisien sebesar 39.84% menggambarkan bahwa kegiatan ini masih belum mampu mencapai tingkat



efisien. Digambarkan bahwa Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat dengan target 90% hanya menerima sebesar usulan 55.10% dan capaian 58.00% dan dengan anggaran kegiatan sebesar Rp.170,000,000,- dengan realisasi Rp.147,861,000,- maka prosentase yang dicapai 86.98%, dikarenakan usulan yang digunakan untuk membantu proses penganggaran APBN tahun 2019 Provinsi Kaltim sebesar Rp.18,511,385,646,000 dari seluruh Provinsi dan Kabupaten kota. Sedang untuk anggran APBN yang diterima pada tahun 2019 sebesar Rp. 8,288,815,995,000,- .

- f. Tingkat Efisiensi Kinerja Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD dengan persentase capaian kinerja sebesar 105% dan prosentase penyerapan anggaran sebesar 99.45% maka tingkat efisiensi sebesar 5.81% menggambarkan bahwa kinerja ini efisiensi pelaksanaan sebesar 5.81% terhadap anggaran.

**Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Data/Informasi Spasial Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengoptimalkan fungsi koordinasi dengan target 97.50% dan realisasi 101.68% maka capaian indikator tujuan adalah 113.03%.**

**Sasaan2. Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

**Tabel III-9  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja  
Tahun 2018**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	100%	105	<b>105.00%</b>
2	Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	95%	115%	<b>121.05%</b>



**2. Membandingkan antara realisasi Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel III-10**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / penurunan Tahun 2018 $7 = (6-5) / 5 * 100\%$
			2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	70.81	85	105	400
2	Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	%	100	108.11	115	137.8

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

**Tabel III-11**  
**Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RENSTRA**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	100	105	105.00
2	Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	%	95	115	121.05

**4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

**Indikator Kinerja 4.** Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan

**- Keberhasilan dan Kegagalan**

- a. Indikator Kinerja Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan dalam penghitungan data menggunakan data yang telah diisi dibanding dengan basis data yang harus diisi.



- b. Jumlah *database* tersedia melalui aplikasi Sistem Informasi Data dan pnc IGT pada Bappeda Prov. Kalimantan Timur pada tahun 2018 berjumlah 3160 dari 3.494 Elemen Data sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2010 sedang data Geospasial berjumlah 30 IGT dari target data 20 IGT tahun 2018 maka dari keduanya diperoleh realisasi sebesar 105%.
- c. Indikator kinerja Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan realisasi 2018 sebesar 105% lebih tinggi dibanding dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 85% lebih tinggi dibanding dengan realisasi tahun 2016, dan tahun 2015 dimana masing-masing adalah 70.81% dan 54,44% . Hal ini dilihat dari basis data yg terisi oleh SKPD pada triwulan I tahun 2018.

- **Peningkatan/Penurunan**

- a. Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan dimana target 100%, dan realisasi 105% maka capaian kinerja adalah 101.01%. Dapat dikatakan bahwa indikator ini adalah sangat tinggi.
- b. Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan untuk memperoleh peningkatan/penurunan maka dilakukan perbandingan terhadap realisasi 2018 (105%) dengan realisasi 2017 (85%) maka diperoleh peningkatan 400 %.
- c. Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan untuk mencapai tingkat kemajuan diperoleh dengan membandingkan realisasi-realiasi 2018 (100%) dengan target akhir renstra (99%) maka diperoleh tingkat kemajuan senilai 101.01%.

- **Alternatif Solusi**

- a. Perlu dukungan dari seluruh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah terus didorong dan bertemu secara konsisten dalam melaksanakan input data melalui sistem SIDATA setiap waktu dalam tahun berjalan.
- b. Perlu dilaksanakan pertemuan setiap semester guna mencapai pencapaian target Indikator Kinerja.



- c. Perlu dan harusnya Perangkat Daerah mempunyai data peta tematik memiliki Sistem.
- d. Anggaran untuk pengumpulan data spasial masih belum dimiliki Perangkat Daerah.

**Indikator 5.** Prosentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan

- **Keberhasilan dan Kegagalan**

- a. Indikator kinerja Prosentasi koordinasi perencanaan pembangunan Realisasi indikator kinerja ini adalah 115% dengan capaian 121,05% telah mencapai maksimal pada prosentase koordinasi perencanaan pembangunan. Berdasarkan nilai Interpal realisasi kinerja realisasi dan capaian kinerja mencapai nilai Sangat Tinggi.
- b. Proses perencanaan dimaksud adalah keterlibatan Bidang perencana dalam pelaksanaan proses perencanaan dimulai dari Asistensi Renja SKPD, Asistensi Anggran SKPD dan Kab Kota dalam Rakor prioritas, Rakor SKPD dan Musrembang RKPd. Serta keikutsertaan Bidang dalam Musrembang Nasional se Indonesia guna pelaksanaan koordinasi perencanaan baik Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta kegiatan yang telah terjadwalkan.

- **Peningkatan/Penurunan**

- a. Indikator Kinerja Prosentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan dimanan target 95%, dan realisasi 115% maka capaianan kinerja adalah 121.05%.
- b. Indikator Kinerja Prosentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan untuk memperoleh peningkatan/penurunan maka dilakukan perbandingan terhadap realisasi 2018 (115%) dengan realisasi 2017 (108.11%) maka diperoleh peningkatan 137.8 %.
- c. Indikator Kinerja Prosentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan untuk mencapai tingkat kemajuan diperoleh dengan membandingkan realisasi-realiasi 2018 (115.00 %) dengan target akhir renstra (95%) maka diperoleh tingkat kemajuan senilai 121.05%.



## 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

**Indikator Kinerja 4.** Tingkat Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan

a. Penyelenggaraan pengembangan data dan informasi statistik sektoral

### 1. Kinerja Triwulanan Perekonomian Kaltim

Kinerja Triwulanan Perekonomian Kaltim Tahun 2018, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 buah buku setiap triwulan. Buku ini berupaya untuk mengartikulasikan berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur selama rentang waktu triwulanan, isi buku ini menginformasikan dinamika perkembangan angka PDRB Kalimantan Timur setiap triwulan yang beberapa indikator ekonomi dan sosial budaya lainnya yang dianggap relevan selama periode triwulan berjalan. Diharapkan dengan buku ini bisa menjadi media bagi pengguna data daerah, khususnya para pemangku kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur dalam memanfaatkan untuk keperluan *monitoring* dan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di Kalimantan Timur.

### 2. Buku Buletin Bappeda Prov. Kaltim

Buku Buletin Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018 berisikan agenda kegiatan dan pelaksanaan pembangunan, *event* serta kegiatan Darma Wanita yang dilaksanakan oleh Bappeda Prov. Kaltim yang terbit setiap bulan dengan cetakan sebanyak 90 buah buku setiap bulannya

### 3. Buku Kliping Pembangunan

Buku Kliping Pembangunan Tahun 2018 dilaksanakan oleh staf perpustakaan dengan mengumpulkan potongan berita koran setiap harinya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan di Kalimantan Timur dengan 3 buah buku setiap bulannya.



#### 4. SIDATA (Sistem Informasi Data) Provinsi Kalimantan Timur

SIDATA Kaltim merupakan sebuah aplikasi program berbasis web yang berisikan informasi data-data pembangunan Kaltim baik data statistik dasar maupun sektoral yang tersaji dalam bentuk tabel dan grafik secara *series* per tahun sebagai langkah dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan Kaltim, atau dengan kata lain untuk memudahkan akses data-data.

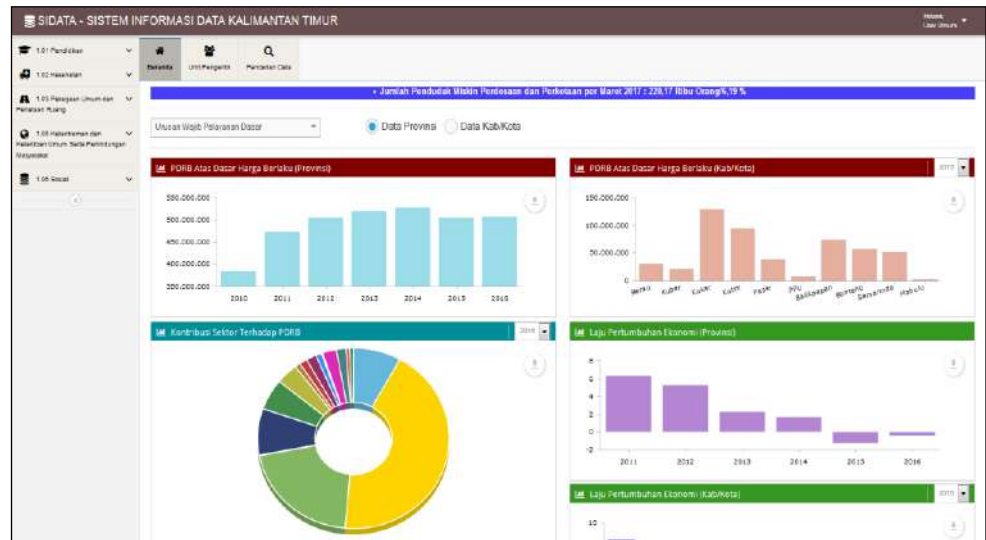
Pada kesempatan ini Perangkat Daerah dan instansi vertikal diminta untuk melakukan *checklist* data sesuai dengan ketersediaan data di masing-masing lembaga yang kemudian dikumpulkan maksimal satu minggu dalam bentuk surat yang di tanda tangani oleh Kepala PD atau Instansi Vertikal ditujukan kepada UPTB Pusat Data dan Informasi. Selain itu *checklist* disertai dengan keterangan serta data dasar pendukung indikator yang diusulkan serta analisisnya.

Sistem Informasi Data (SIDATA) Kaltim mulai dikembangkan pada tahun 2015 dan berisikan informasi data-data pembangunan Kaltim baik data statistik dasar maupun sektoral yang tersaji dalam bentuk tabel dan grafik secara *series* per tahun sebagai langkah dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan Kaltim.

SIDATA Kaltim berisikan sekurang-kurangnya 3.509 elemen data yang terfokus pada penyediaan data-data pembangunan daerah, data capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai Permendagri 86 Tahun 2018 dalam penyusunan RKPD, RPJMD, serta data indikator kinerja daerah Kaltim dan dapat diakses secara *online* melalui alamat [www.sidata.kaltimprov.go.id](http://www.sidata.kaltimprov.go.id).



**Gambar III.2**  
**SIDATA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**



### 5. e-Library Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Perpustakaan digital (*digital library* atau *electronic library* atau *virtual library*) adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan dapat diakses secara komputersisasi. Jenis perpustakaan ini berbeda dengan jenis perpustakaan konvensional yang berupa kumpulan buku tercetak, film mikro (*microform* dan *microfiche*), ataupun kumpulan kaset audio, video, dan lain-lain.

Data dari perpustakaan digital berada dalam suatu komputer server yang bisa ditempatkan secara lokal, maupun di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan cepat dan mudah lewat jaringan komputer. Dengan sistem ini setidaknya memudahkan akses dan menumbuh kembangkan minat baca masyarakat terutama bagi aparatur sipil negara, dan memudahkan dosen, peneliti, pihak swasta, mahasiswa, siswa sekolah dan pengguna lainnya melalui teknologi yang dimiliki.

Perpustakaan Bappeda Online telah terkoneksi dengan i-Kaltim yaitu aplikasi Perpustakaan digital yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur yang telah terbangun terlebih dahulu. Perpustakaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur



senantiasa akan terus berupaya menambah koleksi referensinya dan menjalin kerjasama dengan perpustakaan yang ada di Kalimantan Timur maupun diluar Kalimantan Timur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menambah wawasan pengelola Perpustakaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. e-Library Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dapat diakses secara online melalui alamat [www.elib.bappedakaltim.com](http://www.elib.bappedakaltim.com).

**Gambar III.3**  
**e-Library Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**



## 6. Penyelenggaraan pengembangan data dan informasi Geospasial tematik

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014



tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, maka dalam rangka mewujudkan Kebijakan Satu Peta (KSP) di Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) yang diaplikasikan melalui penyelenggaraan *One Data One Map*. Pengembangan sistem *One Data One Map* dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selaku Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, dengan pendampingan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sejak diresmikan tanggal 2 April 2014, Geoportal *One Data One Map* dapat diakses secara online melalui alamat [www.onedataonemap.kaltimprov.go.id](http://www.onedataonemap.kaltimprov.go.id)

**Gambar III.4**  
**Sistem One Data One Map Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**



Pelaksanaan Kegiatan Tim Geospasial tahun 2018 :

1. Rakor Simpul Jaringan Regional Kalimantan 2018

Rakor serta Bimbingan Teknis Penguatan Simpul Jaringan Regional Kalimantan Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 April 2018 di Balikpapan. Terkait kebutuhan Pemerintah Daerah dalam keperluan Unit



Pengelola Teknis Informasi Geospasial (UPT IG) Daerah sebagai unit khusus dalam mengelola informasi geospasial untuk perencanaan dan pemantauan pembangunan daerah

2. Forum Data 1, *One Data One Map* Prov. Kaltim tahun 2018.

Pada hari Kamis, 25 Juli 2018, bertempat di rumah *Geospasial Supportal Comman Center*, Kantor Bappeda Prov. Kaltimb yang dihadiri oleh perwakilan Kelompok Kerja Produksi, perwakilan Kelompok Kerja Pengelolaan dan Penyebarluasan serta Kelompok Kerja Teknis Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan peraturan perundangan turunannya, serta Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan *One Data One Map*.

3. Kunjungan Perifikasi Bhumandala Award Tahun 2018

Pada tanggal 7 September 2018 (Jumat) yang lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerima Kunjungan dan Verifikasi dari Tim Juri Bhumandala Award 2018 di Ruang Rapat GSCC Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penilaian Penghargaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah terbaik untuk Tahun 2018, yang penilaiannya meliputi Aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, dan Standarisasi Data, dimana pada tahun 2016 yang lalu, Pemprov Kaltim berhasil meraih Peringkat 1 Nasional.

4. Tim Juri Bhumandala Award kali ini dipimpin oleh Bpk Heri Sutanta (UGM) dan Bpk Bebas Purnawan (Univ. Pakuan), sedangkan pemaparan dari Bappeda disampaikan oleh Kabid Prasarana Wilayah Bpk. Yusliando. Pada kesempatan kali ini hadir pula Kepala Dinas Perkebunan (Bpk. Ujang Rachmad) yang memberikan pemaparan terkait dengan pembangunan dan operasionalisasi WEB GIS Perkebunan sebagai salah satu Unit Produksi di JIGD Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, hadir pula Ketua P2-IIG Universitas Mulawarman (Bpk. Yohanes Budi), BPS, Dinas PUPRPERA, Dinas ESDM, Dinas Kominfo, dan Unit-Unit Produksi lainnya.



**Indikator 5.** Prosentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan

1. Koordinasi Perencanaan pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH

Tujuan penyusunan Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2018 adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

Adapun kegiatan koordinasi pada subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Rakor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
2. Kaltim Summit Provinsi Kalimantan Timur
3. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan Antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Daerah Tahun 2018
4. *Green Budget Tagging* Provinsi Kalimantan Timur
5. Forum Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Musrenbang RKPD Tahun 2018
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018 untuk pengisian RKP 2019
8. Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Perangkat Daerah 2019
9. Forum Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik RPJMD Prov. Kaltim 2018 – 2023
10. Asistensi Program Perangkat Daerah Terkait Penurunan Emisi Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Kalimantan Timur

Secara sektoral evaluasi perlu dilakukan terhadap strategi, arah kebijakan, program, dan implementasi kegiatan pada sektor-sektor: Pertanian Dalam Arti Luas, Industri, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi, Pariwisata, dan perdagangan (khususnya ekspor



dan impor). Kalimantan Timur sebagai negara yang kegiatan ekonomi masyarakatnya bersandar pada sumber daya alam sangatlah rentan terhadap perubahan iklim. Sektor pertanian, kesehatan, perikanan, kelautan, pariwisata, kehutanan, dan perindustrian merupakan sektor-sektor yang kritis terkena dampak. Untuk itu, sektor-sektor tersebut perlu ditingkatkan kemampuannya, beradaptasi dalam menghadapi dampak perubahan iklim, baik dari segi kegiatan ekonomi, namun khususnya dalam hal pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perubahan iklim.

Dibatasi dengan berkurangnya kemampuan fiskal daerah provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan perencanaan yang matang dan tepat sasaran untuk mencapai target-target pembangunan terutama yang tertuang dalam RPJMD Kaltim 2013-2018. Beberapa kendala yang terjadi antara lain: pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah belum dapat dipastikan di awal perencanaan, sehingga program/kegiatan yang direncanakan masih ada yang belum tepat sasaran dan adanya perubahan jumlah program prioritas daerah menyebabkan beberapa target akhirnya tidak terpenuhi. Ke depan sebaiknya pagu indikatif dan program prioritas dapat ditetapkan di awal sebelum berjalannya perencanaan. Kepada setiap Perangkat Daerah juga sebaiknya memiliki data dasar hasil evaluasi yang rinci dan detail yang nantinya digunakan untuk perencanaan kedepan agar tepat sasaran.

b. Laporan *Budget Tagging* Ekonomi Hijau

Seiring dengan berkembangnya teknologi, kegiatan ekonomi pun semakin bertambah dan bervariasi. Namun, seringkali kegiatan-kegiatan tersebut berbenturan dengan kepentingan lingkungan. Model ekonomi hijau muncul untuk menjawab masalah ini. Ekonomi hijau merupakan perekonomian yang mengakui bahwa kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial itu penting, namun lingkungan juga sama pentingnya.



Menuju ke arah pembangunan yang lebih hijau, sudah ada langkah – langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan makro, seperti membuat komitmen dan kebijakan untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang dicapai pada tahun 2030. Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang dituangkan di dalam Peraturan Gubernur No. 39/2014 tentang RAD GRK, yang mana saat ini sedang di dalam tahapan revisi. Pada tahun 2018 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan WWF Indonesia melakukan kegiatan Penandaan Anggaran Hijau (*Green Budget Tagging*). Penandaan Anggaran Hijau (*Green Budget Tagging*) ini bertujuan untuk penanda anggaran yang relevan dengan kegiatan 6 kluster bidang dan mengidentifikasi proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan dalam pembangunan rendah emisi. Dari beberapa analisis berdasarkan belanja langsung, belanja barang dan jasa dan belanja modal di 11 OPD yang mendukung 3 Misi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur, maka didapatkan kesimpulan yang diantaranya ialah:

1. Dilihat dari tren kenaikan alokasi belanja hijau di 6 kluster GPB, Provinsi Kaltim memiliki basis platform alokasi anggaran hijau yang sangat baik
2. Kenaikan alokasi belanja hijau di 6 kluster GPB pada APBD tahun 2015 ke 2016 sempat mencapai 57,82% namun langsung drop di 2016 menuju 2017 sebesar 15,98% meskipun masih tetap tumbuh dari 15,66% di tahun 2016 menjadi 18,64% di tahun 2017



3. Kondisi ini yang perlu diwaspadai karena presentase (%) alokasi belanja hijau menurun drastis di saat kondisi fiskal daerah tidak stabil.
4. Dilihat dari perbandingan alokasi belanja langsung dan tidak langsung beberapa OPD masih memiliki persentase belanja tidak langsung yang relatif tinggi di 2017.
5. Hanya Dinas PUPR dan Dinas ESDM yang trend alokasi belanja tidak langsungnya berkurang secara signifikan.
6. Masih tingginya alokasi belanja tidak langsung ini justru akan mengurangi ruang gerak fiskal APBD yang seharusnya dapat digunakan secara langsung menangani permasalahan/isu tematik green.
7. Bagaimana ke depan seharusnya karena di Dishut, Dispar, DLH, DKP dan Dinas Perkebunan justru konsisten tinggi alokasi belanja tidak langsungnya.
8. Dari alokasi belanja hijau di 6 kluster GPB, beberapa OPD sudah konsisten mengalokasikan anggaran secara signifikan (Dishut, Dishub, DKP, Dinas PUPR dan Dinas ESDM).
9. DLH dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura belum sama sekali mengalokasikan anggaran hijau 6 kluster GPB sejak 2015-2017.
10. Dilihat dari alokasi belanja hijau untuk belanja pegawai, Dinas Kehutanan dan Dinas PUPR memiliki trend positif dari tahun 2015-2017.
11. Alokasi belanja HIJAU untuk belanja pegawai di Dinas Kehutanan bahkan meningkat tajam di 2017.
12. Perlu dipikirkan untuk mencari pola optimalisasi besaran belanja HIJAU yang digunakan untuk alokasi belanja pegawai ini (karena merupakan belanja langsung).

Catatan: pola yang terjadi kecenderungan trend kenaikan alokasi belanja hijau untuk belanja pegawai ini meningkat lagi di OPD lainnya



13. Dilihat dari alokasi belanja hijau untuk belanja barang dan jasa, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR cenderung naik dari tahun 2015- 2017.
  14. Ini yang perlu diwaspadai apakah komponen terbesar di dalam alokasi belanja barang dan jasa ini.
    - a. komponen terbesar dialokasi untuk belanja perjalanan dinas meskipun nantinya dapat dipertanggungjawabkan misalnya dikaitkan dengan dampak output/outcome yang dihasilkan terkait penurunan emisi.
    - b. Dinas Perhubungan memiliki persentase alokasi belanja hijau untuk barang dan jasa yang sangat besar di tahun 2017 setelah sempat drop di tahun 2016.
  15. Dilihat dari alokasi belanja hijau untuk belanja modal, tercatat hanya Dinas PUPR yang menjalankan aloaksi belanja ini.
  16. OPD lainnya tidak melakukan alokasi belanja modal sama sekali.
  17. Catatan serius :
    - a) Bappeda perlu segera dicarikan solusinya sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian tujuan pembangunan HIJAU
    - b) Jika ketiadaan alokasi belanja hijau yang digunakan untuk belanja modal karena road mapnya masih fokus kepada pembentukan enabling condition, harus transparan di periode kapan pembangunan modal fisik akan dimulai?
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Bidang Pertanian dan Perikanan
- a. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan.  
Penyusunan Laporan Triwulanan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan mengenai perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan





program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Nuklir untuk Peningkatan Produksi Pertanian dalam Arti Luas (4-7 Juli 2018).
2. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Berau (19 – 21 Juli 2018).
3. Konsinyering Capaian RPJMD 2013 – 2018 Provinsi Kalimantan Timur (20-21 Juli 2018).
4. Monitoring dan Kunjungan Lapangan Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Kutai Timur (24-27 Juli 2018).
5. Monitoring dan kunjungan lapangan pada kegiatan dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim ( 30 Juli 2018).
6. Laporan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kaltim 2018-2023 dan Pembahasan RENSTRA Bappeda 2018-2023 (31 Juli-4 Agustus 2018).
7. Pertemuan sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan, Pertemuan Sosialisasi Perizinan Usaha Perkebunan, Penetapan harga TBS Bulan Juli 2018 dan Pengawasan Perjanjian Kemitraan oleh KPPU (31 Juli-1 Agustus 2018).
8. Pertemuan dalam Rangka Kemitraan Usaha Indikasi Geografis (IG) Lada (13 September 2018).
9. Meninjau kesiapan pengembangan sentra perikanan dan penerima bantuan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) Tahun 2019 (13-15 September 2018).
10. Assistensi Regulasi Implementasi Peraturan Kepala Badan BPOM tentang SPP - IRT( 19 September 2018 ).
11. Sosialisasi Germas dan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu RAD-PG Tahun 2018 Regional Tengah-Timur (19-22 September 2018)



12. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 (26-28 September 2018).

b. Laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Tujuan umum penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebagai alat ukur dan bahan evaluasi pencapaian program kegiatan pangan dan gizi bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta untuk meningkatkan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang.

Beberapa indikator pada Laporan Pelaksanaan RAD-PG Tahun 2018 belum keseluruhan tercapai, masih perlu usaha yang lebih keras lagi untuk mencapai indikator-indikator tersebut.

Adapun hasil dari pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Tahun 2017-2018 sebagai berikut :

1. Perbaikan Gizi Masyarakat

Untuk menekan angka balita gizi kekurangan gizi, Pemerintah Daerah akan melakukan pendekatan keluarga dan pendataan profil kesehatan keluarga, optimalisasi integrasi program gizi secara lintas program dan sektor, peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan/ Bimtek, serta Penguatan kerjasama antara lintas sector dan lintas program terkait dan stake holder pada 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kabupaten/Kota. Serta untuk lebih meningkatkan angka ibu hamil kurus yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi pemberian PMT ke puskesmas dan sasaran.

2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan

Untuk meningkatkan aksesibilitas pangan dilakukan dengan mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi



seimbang. Langkah lain adalah dengan melakukan kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya local.

3. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

BBPOM Kalimantan Timur akan terus melakukan pengawasan distribusi lebih intensif serta mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan ke sarana distribusi serta melakukan advokasi dan tata hubungan kerja. Selain itu untuk meningkatkan mutu hasil perikanan dan menekan UMKM yang belum memenuhi persyaratan mutu maka diperlukan upaya mengikutsertakan pelatihan pembina mutu daerah ke Pusat serta melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap UMKM.

4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

- a. Melakukan evaluasi dan pemantauan regulasi/kebijakan PHBS yang telah dibuat bersama lintas sector.
- b. Melakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola ppromosi kesehatan di puskesmas.
- c. Melaksanakan survei PHBS bersamaan dengan survei keluarga sehat, melakukan kajian perlu atau tidaknya indikator survei PHBS dimasukkan ke RPJMD selanjutnya.
- d. Peningkatan Kapasitas SDM pengelola UKS & Pengelola di Sekretariat Tim Penggerak UKS/M.
- e. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan UKS/M

5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi.

3. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bid Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata.

a. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata

Dalam mewujudkan koordinasi yang berdaya guna dalam perencanaan dan evaluasi program bidang ekonomi Bappeda Provinsi



Kalimantan Timur, maka diperlukan informasi dan data-data yang berisi perkembangan dan isu-isu strategis yang berkembang di Kalimantan Timur baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, bidang ekonomi melakukan kegiatan koordinasi sektor-sektor ekonomi, antara lain industri dan perdagangan, koperasi dan UMKM, pariwisata hingga sektor investasi untuk melakukan sharing pencapaian dan permasalahan yang muncul.

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan triwulan I :

1. Rapat Koordinasi Bappeda Tahun 2018
2. Konsultasi Publik RKPDP Kaltim Tahun 2019
3. Pra Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakortekbang) Tahun 2018

Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II :

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2018
6. Arah Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2019
7. Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kaltim 2018-2023

Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III :

8. Finalisasi LKPJ-AMJ Gubernur Tahun 2013 – 2018
9. Konsinyering RPJMD Tahun 2018 – 2023

Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV :

10. Monitoring Sektor Industri, Perdagangan dan Koperasi
11. Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023
12. FGD Terbatas Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara
13. Asistensi APBD TA 2019
14. Monitoring Sentra Industri Kecil Sumber



15. Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Optimalisasi Pelaksanaan Program
16. Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota pada APBD TA 2019
17. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 di Kemendagri
18. Kunjungan Studi Orientasi ke Bappeda Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019 ini akan mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan Kementerian Pariwisata dan eksternal/antar sektor K/L serta dengan pihak pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan asosiasi/pelaku usaha pariwisata dan masyarakat luas.

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Pelaksanaan Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019 selama kurun waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang di tingkat Kab/kota, nasional maupun global sehingga pada waktunya diperlukan penyempurnaan.

4. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid. Sumber Daya Manusia
  - a. Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Masyarakat
  - b. Laporan Koordinasi Pembangunan Masyarakat

Buku laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat dibuat untuk memberikan gambaran secara umum ditinjau dari bagaimana kesiapan masyarakat untuk berperan serta dalam proses



pembangunan terutama dalam menjawab tantangan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD maupun RPJMD yang akan datang. pada buku ini pula memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografis dan kondisi demografis).

Fokus pembangunan sumberdaya manusia akan menempatkan setiap individu di suatu wilayah menjadi pemegang berbagai kewenangan atas masa depan kehidupannya melalui peningkatan kualitas dan daya saing pada tatanan pasar kerja. Oleh karena itu, komponen penyusun pada berbagai perencanaan pembangunan manusia akan berputar pada aspek kesehatan, pendidikan, serta ekonomi individu sehingga asumsi masyarakat yang sehat dan terdidik akan memiliki kesempatan lebih dalam memiliki daya saing perekonomian dikehidupannya. Berbagai analisis statistik tersebut akan menentukan strategi, pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama periode pembangunan daerah.

IPM diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990. Pada tahun 2010, terdapat perubahan pada metode penghitungannya (IPM Metode Baru). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani



pendidikan formal Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat, dari tahun 2010 - 2017 IPM Provinsi Kalimantan Timur naik 3,81 poin dalam jangka waktu delapan tahun. Capaian peningkatan IPM ini menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi juga semakin baik. Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi kategori tinggi (IPM > 80), kategori rendah (IPM < 60). Sejak tahun 2010, IPM Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai kategori tinggi dengan angka 71,31. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 2017 mencapai 75,12. Meski belum ada perubahan level pada capaian IPM, namun angka IPM yang terus meningkat menunjukkan adanya peningkatan pencapaian kualitas sumberdaya manusia Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak lepas dari peningkatan setiap komponen penyusunnya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM Provinsi Kalimantan Timur, komponen penyusun IPM juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun diantaranya;

- a. Derajat Kesehatan (Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat)
- b. Derajat Pendidikan (Dimensi Pengetahuan)



c. Derajat Standar Hidup Layak

Pelaksanaan Pembangunan untuk mendukung kondisi

Pembangunan Masyarakat, meliputi :

1) Pembangunan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada setiap warga untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tersebut.

Dalam dunia pendidikan di Kalimantan Timur masih terdapat permasalahan diantaranya, kondisi infrastruktur yang belum merata; wilayah yang sulit diakses; fasilitas pendidikan dirasakan masih minim;

Maka peningkatan kualitas Masyarakat Prov. Kaltim tidak hanya dari aspek kualitas, (kompetensi tenaga pendidik) namun pula peningkatan kuantitas penyedia jasa pendidikan seperti infrastruktur sekolah terutama di wilayah-wilayah yang aksesnya masih sulit dijangkau.

Pembangunan Bidang Pendidikan dilihat dari :

- a. Status Pendidikan
- b. Ijazah/STTB tertinggi yang ditamatkan
- c. Kemampuan Membaca dan Menulis
- d. Fasilitas Pendidikan

2) Pembangunan Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktifitas





perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama. Berdasarkan UU No.23/1992 tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi.

Salah satu indikator derajat kesehatan penduduk adalah status kesehatan. Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktifitas penduduk.

Status kesehatan masyarakat dilihat dari :

- a. Keluhan Kesehatan
- b. Kesakitan
- c. Berobat Jalan
- d. Kepemilikan Jaminan Kesehatan
- e. Penggunaan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan

Status kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah menunjukkan hasil yang bagus, namun Pemerintah Daerah harus tetap meningkatkan pelayanan kesehatannya agar semakin baik yang ditunjukkan dengan berkurangnya keluhan kesehatan, berkurangnya angka kesakitan dan adanya pemerataan fasilitas kesehatannya.

### 3) Pembangunan Bidang Teknologi dan Informasi

Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu pendorong globalisasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan jumlah penduduk tentunya akan membawa dampak pada perkembangan sarana komunikasi dan telekomunikasi guna memperlancar akan kebutuhan informasi. Infrastruktural membantu konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah lain



secara cepat dan luas. Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran penggunaan alat komunikasi dari sambungan telepon biasa menjadi telepon seluler. Internet merupakan kependekan dari *Interconnection Networking* yang merupakan jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan computer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang dapat didapatkan dari internet. Mulai dari informasi berupa berita, email, jejaring sosial, hiburan dan lain sebagainya.

5. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

a. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial

Maksud dari penyusunan Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Prov. Kaltim dimaksudkan adalah sarana informasi serta bentuk pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Prov. Kaltim selama satu tahun anggaran 2018. Sedang tujuan penyusunan Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Prov. Kaltim adalah sebagai bahan masukan dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun berikutnya.

Koordinasi yang dilaksanakan adalah :

1. Rapat Koordinasi Bappeda Tahun 2018
2. Konsultasi Publik RKPD Kaltim Tahun 2019
3. Pra Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakortekbang) Tahun 2018
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018



5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2018
  6. Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kaltim 2018-2023
  7. Finalisasi LKPJ-AMJ Gubernur Tahun 2013 – 2018
  8. Konsinyering RPJMD Tahun 2018 – 2023
  9. Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023
  10. FGD Terbatas Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara
  11. Asistensi APBD TA 2019
  12. Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Optimalisasi Pelaksanaan Program
  13. Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota pada APBD TA 2019
  14. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 di Kemendagri di Tingkat Daerah terdiri dari 10 Kab./Kota dan di Tingkat Pusat
  15. Koordinasi Ke Kab/Kota
- Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran dan perjalanan dinas selama melaksanakan koordinasi menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2018.

b. Laporan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan pembangunan, karena kemiskinan adalah permasalahan utama yang harus dicari cara penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan sistematis melibatkan semua unsur masyarakat, Pemerintah dan Badan Usaha. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tersebut diperlukan berbagai upaya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, salah satunya dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai inti penggerak kegiatan berbasis



penanggulangan kemiskinan di tingkat Pemerintah Pusat dan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ditingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penerus kebijakan dan menjalankan tugas koordinasi serta pengendalian seperti yang telah diuraikan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan :

1. Memperbaiki program perlindungan sosial.
2. Meningkatkan akses pelayanan dasar.
3. Memberdayakan kelompok masyarakat miskin.
4. Pembangunan yang inklusif

Salah satu tantangan berat di tahun 2018 ialah mereduksi kemiskinan, jumlah penduduk miskin terutama mengacu rilis BPS Kaltim bahwa Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada Maret 2018 sebesar 218,90 ribu (6,03 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 sebesar 218,67 ribu (6,08 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara persentase turun sebesar 0,05 persen tetapi secara absolut bertambah sebanyak 0,23 ribu orang. Jumlah itu ternyata mengalami peningkatan penduduk miskin sebanyak 0,23 ribu jiwa. Argumen yang mendasari peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pemutusan hubungan kerja di beberapa perusahaan terutama di sektor pertambangan dan penggalian Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk



berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

Sejak tahun 2012 seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah membentuk TKPKD dengan SK Bupati/Walikota masing-masing dengan beranggotakan SKPD terkait.

Dalam pelaksanaannya, TKPKD diharapkan mampu Mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.

1. Melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.
2. Menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)

Dalam usaha pengurangan kemiskinan, pola pengembangan ekonomi di Kalimantan Timur yang banyak berpola ekspansif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam harus diarahkan secara khusus agar dapat berkontribusi pada peningkatan penghidupan kelompok miskin di Kalimantan Timur dan tidak merusak akses mereka terhadap sumber penghidupannya. Oleh karena itu, fokus utama penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur adalah "penguatan dan diversifikasi kegiatan ekonomi masyarakat miskin



yang bersumber pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan” , meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masyarakat miskin perdesaan dan perkotaan agar terserap di pasar kerja.
2. Pemberian jaminan pelayanan dasar dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok miskin di wilayah perdesaan, daerah terpencil, dan perbatasan.
3. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dasar terpadu (listrik, sanitasi, air bersih) bagi masyarakat perdesaan.
4. Pengembangan dan diversifikasi sumber usaha masyarakat miskin berbasis sumber daya alam serta peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksinya.

Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 direkomendasikan beberapa strategi antara lain :

1. Fokus pada target melalui pemberdayaan masyarakat miskin terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan dan kesehatan);
2. Mensinergikan program lintas SKPD dan Kab/Kota;
3. Mengoptimalkan Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan;
4. Sasaran Program Mengacu Pada Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2017;
5. Menyesuaikan Target Kinerja Yang Akan Dicapai;
6. Memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui Dana Dekon dan CSR.

c. RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Misi RPJMD . Pembangunan global yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan global periode 2016-2030 sebagai transformasi Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) untuk menjangkau masyarakat yang



sangat rentan. SDGs meneruskan prioritas-prioritas pembangunan MDGs yang meliputi : penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*). Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator.

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs merupakan amanat dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yang harus dilaksanakan setiap daerah yang sesuai dengan prinsip inklusif dan partisipatif.

Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur berisi arah kebijakan dan target yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalimantan Timur pada prinsip-prinsip TPB/SDGs yaitu integrasi dan no one behind (tidak ada satupun yang tertinggal).

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dokumen RAD ini juga dilengkapi dengan lampiran Matrik Program dan Kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.

Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang bersifat terbuka dan menerima saran dan kritik baik dari pemerintah maupun non pemerintah, oleh karenanya masukan tersebut sangat diharapkan demi kesempurnaan dokumen ini.

6. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
  - a. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan  
Kegiatan koordinasi di masing-masing Bidang merupakan penjabaran dari misi kedua, yaitu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan perencanaan pembangunan regional dan sectoral Maksud dan Tujuan



Penyusunan laporan koordinasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur dimaksudkan untuk memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan program-program pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Kalimantan Timur saat ini. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi koordinasi pembangunan yang akan datang, sehingga program-program pembangunan Provinsi dapat lebih bersinergi dan sinkron dengan program-program pembangunan Kabupaten/Kota se Kaltim maupun dengan program-program Nasional.

Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan Meliputi :

1. Rakor Bappeda Se Kalimantan
2. Rakor Kabupaten/ Kota
3. Rakor Prioritas
4. Musrebang RKPD
5. Rakor Bappeda Regional Kalimantan
6. Rakor Bappeda Regional Indonesia Timur
7. Koordinasi terhadap pihak terkait mengenai :
  - a. Pembangunan Sumber Daya Manusia
    - Bidang Pendidikan
    - Bidang Kesehatan
    - Bidang Kesejahteraan Sosial
  - b. Organisasi Perangkat Daerah
    - Sekretariat Daerah
    - Dinas Daerah Provinsi
    - Lembaga Tinggi Tingkat Daerah Provinsi
    - Lembaga Daerah Provinsi
8. Pemerintahan Umum
9. Kondisi Umum Kepegawaian
10. Kondisi Umum Komunikasi Dan Informatika
11. Kondisi Umum Pembangunan Perbatasan, Daerah Terpencil Dan Terisolir
12. Kondisi Umum Narkotika





13. Kondisi Umum Penanggulangan Bencana
14. Kondisi Umum Kesatuan, Bangsa Dan Politik
15. Forum Group Discussion Rencana Aksi Daerah-Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (FGD RAD-PRK)
16. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
17. Program Agraria Daerah (Sertifikasi Lahan Usaha Pertanian)

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Aparatur mengalami beberapa perubahan yang baik, akan tetapi apabila dilihat berdasarkan sasaran masing-masing program/kegiatan terlihat bahwa setiap pelaksana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada, didalam pelaksanaan operasional pembinaannya lebih dominan sehingga sasaran program/kegiatan dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimasa-masa yang akan datang perlu lebih dicermati visi dan misi serta sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola kegiatan, sehingga didalam pelaksanaan program/kegiatan operasional pembinaan lebih dapat terencana dan sesuai dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rekomendasi yang diberikan bahwa diharapkan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menyampaikan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Buku Laporan Tahunan yang sesuai dengan VISI dan MISI masing-masing Perangkat Daerah (PD), sehingga nantinya dapat menjadikan tolak ukur atau evaluasi kegiatan yang akan datang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

- b. Laporan anugerah Pangripta Nusantara
- c. Laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan



Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014.

Sebagai tindak lanjut atas rumusan strategi tersebut Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun. Indikator utama keberhasilan stranas PPK di tingkat nasional diukur menggunakan *Corruption Perception Index (CPI)* dan *National Integrity System (NIS)*. Penggunaan CPI dan NIS sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi dinilai tepat mengingat CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Maksud dan Tujuan ; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan RPJMD sejak tahun 2014 akan mengukur IPK setiap tahunnya. Survei ini bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target RPJMD dan Stranas PPK.

Secara khusus, Survei Persepsi Korupsi 2018 bertujuan untuk mengumpulkan data antar waktu yang setidaknya menggambarkan tentang daya saing dan hambatan berusaha; potensi korupsi dan integritas pelayanan publik; potensi suap dan integritas sektor bisnis, penilaian sistem integritas lokal, dan penilaian kinerja perekonomian daerah.

Sasaran dan Manfaat : Sasaran kegiatan ini adalah terukurnya Indeks Persepsi Korupsi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sesuai dengan program kerja Pemerintah Provinsi. Kegiatan ini diharapkan mampu mengukur tingkat IPK Provinsi Kaltim sebagai tolak ukur peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Nilai Indeks Persepsi Korupsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah 5,44 (54,41 pada rentang skala nol sangat korup dan 100 sangat bersih).



2. Target IPK 2018 dalam RPJMD yaitu 60,00 belum dapat tercapai.
3. Indikator yang memiliki nilai paling rendah adalah Prevalensi Korupsi.
4. Kapasitas Infrastruktur merupakan faktor paling lemah dalam Daya Saing Lokal.
5. Faktor yang paling Menghambat Kemudahan Berusaha adalah Korupsi.
6. Prevalensi Korupsi yang paling Lazim terjadi adalah Pejabat negara meminta atau menerima suap.
7. Unsur yang paling lazim dalam Akuntabilitas Keuangan Publik adalah banyak dana khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8. Motivasi melakukan korupsi yang paling dianggap lazim adalah korupsi akibat adanya pengamanan proyek pemerintah.
9. Sektor yang dianggap lazim terdampak korupsi adalah Korupsi di Perijinan.
10. Masyarakat lebih memilih Pencegahan Korupsi oleh Pemerintah sebagai tindakan yang lazim dari pada Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik Korup

Rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu :

1. Menekan motivasi untuk melakukan korupsi melalui beberapa tindakan preventif.
2. Meningkatkan daya saing terutama memaksimalkan tim pengendalian inflasi.
3. Lebih meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Publik
4. Melakukan sosialisasi lebih tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Memberdayakan Organisasi Masyarakat Sipil dan Ombudsman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.



6. Mengaplikasikan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Layanan yang meliputi penetapan pedoman penyelenggaraan pelayanan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab terhadap tupoksi yang dibebankan serta memaksimalkan Tim Operasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)
  - d. Laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan
7. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid. Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
  - a. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman

Gubernur Kalimantan Timur telah menetapkan 8 kawasan industri unggulan (strategis provinsi). Untuk mengembangkan kawasan industri tersebut perlu diperhatikan kebijakan yang menyangkut konektivitas transportasi. Konektivitas transportasi merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Pengembangan transportasi ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi mulai proses pengangkutan bahan baku hingga proses distribusi/pemasaran. Untuk merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur serta keterpaduan program antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota maka Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk melakukan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah. Kegiatan koordinasi tersebut dilakukan untuk memberikan arahan dan mensinergikan pelaksanaan program/kegiatan prasarana wilayah di Kalimantan Timur untuk tetap sesuai dengan perencanaan yang disusun, serta



mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai permasalahan pelaksanaan program pembangunan prasarana wilayah.

Beberapa koordinasi pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya sinergitas meliputi:

1. Rakor Bappeda se-Kalimantan Timur di Kota Bontang
2. Rapat Finalisasi RKPD dan Pembahasan Musrenbang Nasional Tahun 2018
3. Rapat Koordinasi Teknis Bidang PU dan Perhubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2018
4. Musrenbang Kota Bontang Tahun 2018 (Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kota Bontang Tahun 2019)
5. Rapat Koordinasi Program Pembangunan Jalan Penghubung Pulau Balang dan Jalan Kawasan Perbatasan
6. Rapat Pembahasan Progres Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK)
7. Rapat Koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020 dan Jangka Pendek 2021-2023 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR di provinsi Kaltim
8. Rapat Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Tahun 2018
9. Rapat Pembahasan Penajaman IKU dan IKK RPJMD 2018-2023
10. Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional II
11. Rapat Pra Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 Wilayah Kalimantan Dan Nusa Tenggara
12. Rapat Rangka Konsultasi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Timur
13. Rapat Evaluasi Perubahan APBD 2018, Koordinasi Pembangunan Jalan Perbatasan di BNPP serta Jalan Akses Pulau Balang di Kementerian PUPR



14. Rangka FGD Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kalimantan Timur 2018-2023 dan Rancangan Renstra Bappeda 2018 – 2023.
15. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
16. FGD Background study Arah Pembangunan Nasional Berbasis Kewilayahan dan Tata Ruang RPJMN 2020-2024
17. Workshop Bantuan Teknik Manajemen & Evaluasi Jalan Daerah Tahun 2018 Dan Seminar Seminar Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan Balikpapan – Samarinda – Bontang – Tenggarong Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Kalimantan Bagian Timur Dan Utara.
18. Koordinasi Pembangunan Jalan Akses Pulau Balang di Bappenas.

Berdasarkan permasalahan mengenai prasarana wilayah di Kalimantan Timur terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun hal-hal tersebut meliputi :

1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan :

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yakni ketersediaan penerangan jalan, rambu, perbaikan kondisi permukaan jalan yang tidak rata dan berlubang. Terkait hal tersebut, pemeliharaan jalan perlu ditingkatkan, penambahan kelengkapan lalu lintas (rambu, marka) serta pemeliharaan jembatan dan penanganan longsoran.

2. Penyediaan Transportasi

Dalam upaya penataan transportasi dan peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas, Pemerintah Daerah telah membangun Kelengkapan Prasarana Keselamatan di jalan diantaranya Pemasangan beberapa Rambu-Rambu Jalan, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan, baik Jalan Provinsi maupun Jalan Nasional untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas.



b. Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola *Availability Payment*

Infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Penyediaan infrastruktur memerlukan kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Perpres No. 38 Tahun 2015 Bab X Pasal 21 menyatakan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan identifikasi proyek-proyek penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha. Tujuan pekerjaan ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang memuat tentang program/kegiatan yang memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan didanai oleh swasta/investasi.

Adapun pola pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KBPU) yang digunakan dalam pembiayaan infrastruktur di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

a. KBPU dengan Struktur berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (Usage-based PPP)

Dalam struktur ini, lingkup penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan meliputi seluruh peran atau pekerjaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab sektor publik. Sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini, BU secara langsung menyediakan layanan infrastruktur kepada pelanggan retail/pengguna akhir, dimana Pemerintah lebih berperan sebagai regulator.

Adapun Program/Rencana Kegiatan yang menggunakan pola pembiayaan KBPU Usage-based meliputi program/rencana kegiatan pada transportasi; infrastruktur jalan; infrastruktur telekomunikasi dan informatika; infrastruktur ketenagalistrikan; pengembangan dan pemeliharaan konservasi Energi Prov. Kaltim; pengembangan energi baru dan terbarukan; dan pengembangan kawasan pariwisata Kep. Derawan.



b. KBPU dengan Struktur berbasis layanan infrastruktur (Availability-based PPP)

Dalam struktur ini, lingkup penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan hanya meliputi sebagian dari seluruh peran atau pekerjaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab sektor publik. Kebanyakan dari layanan jenis ini mencakup sebagian dari proses bisnis pelayanan infrastruktur tersebut BU menerima pembayaran berkala dari PJKP selama periode kontrak atas ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Komponen pembayaran berkala ini meliputi pengembalian investasi (CAPEX), biaya operasional, dan *Return on Investment* (ROI).

Adapun Program/Rencana Kegiatan yang menggunakan pola pembiayaan KBPU *Availability-based* meliputi program/rencana kegiatan pada transportasi darat; infrastruktur jalan; infrastruktur sumber daya air dan irigasi; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air minum; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan air limbah kawasan perkotaan; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan sampah kawasan perkotaan; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase perkotaan; dan infrastruktur fasilitas perkotaan.

c. KBPU dengan Struktur berbasis kontrak operasi dan Pemeliharaan (O&M Contract)

Skema ini tidak mencakup pelaksanaan dan pembiayaan konstruksi fasilitas, kontrak O&M dapat mengacu pada suatu kontrak dimana BU adalah pihak yang diberikan hak untuk mengelola (dalam kasus tertentu: menyewa) fasilitas dengan tanggung jawab untuk pengoperasian, pemeliharaan dan peremajaan tertentu dari fasilitas infrastruktur tersebut.

Adapun Program/Rencana Kegiatan yang menggunakan pola pembiayaan KBPU O&M Contract meliputi program/rencana





kegiatan pada transportasi sungai, danau dan penyeberangan;  
transportasi udara; dan pembangunan jalan bebas hambatan.

8. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid. Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
  - a. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang

Dampak yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air, seperti Irigasi dan Air Baku serta Pengendali Banjir adalah terpenuhinya hak dasar masyarakat berupa Air Minum, terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah, menurunnya angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, meningkatkan nilai investasi daerah, mengurangi degradasi lingkungan, mendukung ketahanan pangan, dan lain-lain.

Agar dampak atau tujuan pembangunan tersebut tercapai, maka dalam implementasinya haruslah memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prov. Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036. Untuk mengukur keberhasilan penetapan target pencapaian program infrastruktur bidang Sumber Daya Air (SDA) & Tata Ruang (TR) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Prov. Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 dilakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi yang menghasilkan gambaran umum hasil koordinasi prasarana SDA & TR, sinergitas program koordinasi prasarana SDA & TR antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan identifikasi permasalahan koordinasi prasarana SDA & TR.

Adapun capaian pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Prov. Kalimantan Timur melalui Dana APBD Prov. Kalimantan Timur Tahun 2018 meliputi:

- A. Program Prioritas Sektor Sumber Daya Air
  1. Program Daya Saing Sektor Sumber Daya Air



Pada awal tahun perencanaan (tahun 2013), jumlah yang terpenuhi baru mencapai 2% atau sebanyak 40 liter/detik . Hingga akhir 2018, secara kumulatif penyediaan air baku untuk Kawasan Industri ditargetkan mencapai 13,40% atau dengan output sebesar 295 liter/detik. Dengan tuntasnya pembangunan Sistem Sekerat, maka target penyediaan air baku untuk Kawasan industri tahun 2018 telah tercapai.

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Ditargetkan pada tahun 2018 kemampuan suplai air baku akan menjadi 330 liter/detik. Hingga akhir tahun 2018, kemampuan suplai air baku telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 330 liter/detik. Pemenuhan tersebut diperoleh dari keberadaan Embung Muru, Embung Sitiu dan Bendung Lombok di Paser, Sumur Kariangau di Balikpapan, Sumur Dalam di Maloy dan Sistem Transmisi Sekerat di Kutai Timur.

3. Program Pengendalian Banjir

Awal tahun perencanaan (2013) diidentifikasi 450 Ha areal genangan banjir yang tersebar di Prov. Kalimantan Timur. Luasan tersebut secara spesifik terdapat di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, dan Kab. Kutai Kartanegara. Tahun 2018 fokus pengendalian banjir terletak di Kota Samarinda dengan penanganan pada 4 sistem sungai. Sistem yang ditangani tersebut yakni Sungai Karang Mumus, Sungai Karang Asam Besar & Loa Bakung. Reduksi luas genangan secara kumulatif mulai tahun 2013 hingga 2018 mencapai 45 Ha sehingga diperkirakan luas genangan tersisa saat ini adalah 405 Ha. Capaian tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013 – 2018.

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

3.900 Ha pada tahun 2013 menjadi 6.820 Ha ditahun 2018. Secara kumulatif, mulai tahun 2013 hingga tahun 2018



terdapat perluasan areal layanan sebesar 2.920 Ha. Perluasan tersebut menambah areal pertanian pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dilayani jaringan irigasi, awalnya seluas

B. Program Sektor Penataan Ruang

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Capaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 74,04%. Adapun capaian Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang; dan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota.

9. Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid. Perencanaan Pembangunan Sektor Perumahan dan Pemukiman

a. laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman

Kegiatan koordinasi ditujukan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan dan mengawal pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersusunnya permasalahan dalam mengimplementasikan pembangunan dan terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan target perencanaan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018.

Hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan pada RPJMD periode III (tahun 2013-2018) menunjukkan bahwa terdapat pembangunan yang belum sepenuhnya tuntas dan masih menjadi program prioritas di periode RPJMD selanjutnya seperti pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas air minum. Untuk menghadapi tantangan dan isu permasalahan dalam pembangunan prasarana perumahan dan permukiman, maka disusunlah rencana tindak lanjut yang dapat



diimplementasikan pada pembangunan infrastruktur di tahun-tahun mendatang, antara lain sebagai berikut:

A. Cipta Karya

1. Di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Gerakan 100-0-100, RPIJM Bidang Cipta Karya, RISPAM dan Jakstrada.
2. Peningkatan cakupan layanan air minum dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Pembangunan SPAM regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa Kabupaten/Kota dan meningkatkan penyediaan air bersih pada PDAM lintas batas administrasi Kabupaten/Kota.
3. Peningkatan kualitas air bersih diprioritaskan dan dikembangkan pada kawasan regional dan daerah-daerah rawan defisit air.
4. Dalam hal penataan bangunan dan lingkungan, difokuskan pada upaya penjaminan keandalan bangunan gedung melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pengawasan pekerjaan fisik.

B. Perumahan dan Pemukiman

1. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP3KP), Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman (RP3) sebagai acuan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Pembangunan rumah layak huni khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
3. Pengurangan kawasan kumuh di 3 Kabupaten/Kota (Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara) yang merupakan kewenangan provinsi.



4. Peningkatan kualitas perumahan akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani secara terpadu melalui kolaborasi pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sehingga dapat menjadi kawasan permukiman yang layak huni.
5. POKJA PKP provinsi memiliki agenda untuk melakukan pendampingan pembentukan POKJA PKP Kabupaten/Kota dan melakukan sinkronisasi program Pusat-Daerah.

C. Bina Konstruksi

1. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan SPM jasa konstruksi Kabupaten/Kota.
2. Menerapkan sistem acuan (benchmarking) pemeliharaan dan kualitas konstruksi di provinsi.
3. Meningkatkan frekuensi kegiatan dengan LPJK dan asosiasi untuk pelatihan/diklat/litbang konstruksi.
4. Sertifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil jasa konstruksi.
5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada kegiatan pembinaan provinsi.
6. Mendorong terbentuknya TPJK Kabupaten/Kota melalui:
7. Melakukan pendampingan/supervisi kegiatan-kegiatan pembinaan dan penyusunan Perda/Perbup/Perwal IUJK.
8. Membentuk tim/unit pengawasan jasa konstruksi.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pada Kabupaten/Kota terkait.

**6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi.



**Tabel III-12**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan**  
**Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6
2	Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Perencana Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	105.00%	98.01%	6.99%
		Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	121.05%	95.65%	25.40%

Berdasarkan data efisiensi penggunaan sumberdaya pada sasaran satu tercapainya integrasi dan sinkronisasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran bahwa :

- a. Tingkat efisiensi Indikator Kinerja Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan dimana persentasi capaian kinerja sebesar 105% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98.01% maka tingkat efisiensi yang dicapai adalah 6.99%, menggambarkan bahwa kinerja ini efisien perencanaan terhadap anggaran.
- b. Tingkat Efisiensi Indikator kinerja Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan dimana persentasi capaian kinerja sebesar 121.05% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95.65% maka tingkat efisiensi yang dicapai adalah 25.40%, menggambarkan bahwa kinerja ini efisien perencanaan terhadap anggaran.

**Tujuan 3. Terkendalinya pencapaian sasaran pembangunan Daerah, dengan target 95% dan realisasi sebesar 154.03% maka capaian pada indikator tujuan 162.137%.**

**Sasaan3. Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur (Data belum Final dari TIM)**



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

**Tabel III-13**  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja  
Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	Prosentase Pencapaian RKPd terhadap Sasaran RPJMD	95%	154.03%	<b>162.137%</b>

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel III-14**  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja  
Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018
			2016	2017	2018	$7 = \frac{(6-5)}{5} \times 100\%$
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Pencapaian RKPd terhadap Sasaran RPJMD	%	83.52	121.64	154.03	647.8

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel III-15**  
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase Pencapaian RKPd terhadap Sasaran RPJMD	%	95	154.03	162.14



#### 4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

##### - Keberhasilan dan Kegagalan

- a. Indikator kinerja Prosentase pencapaian RKPd terhadap Sasaran RPJMD diperoleh dari evaluasi RPJMD terhadap sasaran RPJMD yang termuat pula dalam RKPd .

**Tabel III-16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja RKPd Tahun 2018 Dengan Target RENSTRA**

No.	Sasaran	Indikator (Impact)	Target Kinerja Impact	Realisasi Kinerja Impact	Kinerja
1	Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf	99.50	98.81	99.31
2	Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	APK PAUD	75.00	53.16	70.88
3	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	98.00	97.14	99.12
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	114.00	113.76	99.79
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	92.00	89.13	96.88
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	99.00	97.78	101.25
4	Program pendidikan sekolah menengah atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	81.00	74.90	108.14
	Program pendidikan sekolah menengah kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	90.00	88.20	98.00
		Angka Partisipasi Murni SMK/MAK	81.00	75	92.47
		Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	90.00	88.20	102.04
5	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	18.60	25.00	134.41
		Meningkatnya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	12.00	12.00	100.00
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru (minimal S1/D4)	70.00	86.38	1121.82
		Persentase Guru yang memenuhi standar kualifikasi	70.00	89.79	128.27
7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun)	1-Jul	0.00	0.00
8	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Proporsi anak yang kembali bersekolah (%)	40.00	0.00	0.00
9	Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Angka Kesakitan (Morbiditas)	9.36	11.90	127.14
10	Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM	Angka Kesakitan (Morbiditas)	9.36	10.64	113.68
		Persentase standar Rumah Sakit terhadap pelayanan kesehatan	100.00	75.00	100.00
		Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit	100.00	100.00	133.33
		Persentase Rumah Sakit Yang Memiliki Sarana / Prasarana Penunjang Sesuai Standart	100.00	75.00	101.35
11	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	9.36	43.50	464.74
12	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)	95.00	88.20	92.84





No.	Sasaran	Indikator (Impact)	Target Kinerja Impact	Realisasi Kinerja Impact	Kinerja
		Meningkatnya pengetahuan tenaga medis	95.00	66.00	69.47
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV/AIDS	< 0,1	<1	1000.00
		Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral	99.00	54.40	54.95
		Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk	< 1	0.40	44.44
		Tingkat kematian akibat malaria	4.30	0.00	0.00
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	210.00	100.00	47.62
		Persentase keberhasilan pengobatan TB	93.00	70.00	75.27
		Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS	55.00	35.99	65.44
14	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	17.00	21.00	123.53
		Angka Kematian Balita per 1000 KH	26.00	31.00	119.23
		Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	102.00	177.00	173.53
		Terstandarisasi pelayanan RSKD (jumlah rumah sakit)	45.00	32.00	71.11
15	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	90.00	100.00	111.11
16	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran UMP	UMP = KHL	0.00	0.00
17	Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	80.00	75.00	93.75
18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IPG	63.00	0.00	0.00
19	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB	0.50	0.01	2.00
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB	1.20	0.19	15.83
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	21.50	0.30	1.40
20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan	proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%)	90.00	87.00	96.67
21	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( Rasio Kesenjangan Kemiskinan )	<1	1.00	111.11
22	Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)	Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum	100.00	94.80	94.80
23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya dan melakukan usaha ekonomi (posyantek)	15.55	9.00	57.87
24	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	59.57	46.88	78.70
25	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif	19.00	3.00	15.79
26	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk miskin yang terserap di dunia kerja	650.00	0.00	0.00
27	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu (desa)	35.00	0.00	0.00
28	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan	Persentase petani miskin yang difasilitasi untuk usaha pertanian	50.00	8.00	16.00



No.	Sasaran	Indikator (Impact)	Target Kinerja Impact	Realisasi Kinerja Impact	Kinerja
29	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	Jumlah kepala keluarga miskin yang dilatih budidaya peternakan	300.00	0.00	0.00
30	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana	Persentase meningkatnya daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam	100.00	0.00	0.00
		Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	6.00	1.00	16.67
31	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat	50.00	0.00	0.00
		Jumlah RT miskin yang memiliki rumah layak huni	6085.00	5952.00	97.81
		Jumlah perumahan MBR yang dibantu jalan lingkungan oleh Pemerintah	5.00	2.00	40.00
32	Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa konstruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)	Jumlah tenaga terampil bidang jasa konstruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang)	2200.00	0.00	0.00
33	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%)	100.00	38.00	38.00
34	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)	400.00	0.00	0.00
35	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, usaha kecil menengah	jumlah wirausaha baru (WUB)	1000.00	790.00	79.00
36	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi unggulan (koperasi)	50.00	40.00	80.00
37	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha	0.17	0.00	0.00
38	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru	25.00	60.00	240.00
		Jumlah pencari kerja yang memiliki keterampilan berwirausaha (%)	25.00	60.00	240.00
39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	35.00	24.00	68.57
40	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri	30.00	15.50	51.67
41	Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah	100.00	92.06	92.06
42	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rasio ketersediaan stok komoditi pokok dan barang strategis	1.00	0.00	0.00
		Rasio ketersediaan stok komoditi pokok dan barang strategis	170.00	140.00	82.35
43	Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah kelompok komoditi yang dapat dijaga kestabilan harganya	6.00	3.00	50.00
	Program Pembangunan Jalan Tol	Jumlah jalan tol yang terbangun (persentase ketersediaan jalan Tol)	21.04	16.29	77.42
	Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Jalan dan Jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	65.54	74.71	113.99
44	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (triliun)	43.00	22.88	53.21
45	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Persetujuan Investasi (Triliun)	61.99	38.96	62.85
	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal	1.00	1.00	100.00
	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Nilai realisasi investasi	42.00	18.59	44.26



No.	Sasaran	Indikator (Impact)	Target Kinerja Impact	Realisasi Kinerja Impact	Kinerja
46	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari)	2.00	1.00	50.00
		Jumlah izin berusaha yang diterbitkan	2600.00	1260.00	48.46
47	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah	10.00	0.00	0.00
48	Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir	Volume Usaha kawasan industri (Rp Triliun)	170.00	0.00	0.00
	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan investasi industri	20.00	4.20	21.00
49	Program Perluasan Kebun Sawit	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	2.00	1.17	58.50
50	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	14.00	0.80	5.71
51	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	96.00	0.00	0.00
		Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV (%)	0.00	0.00	0.00
		Penurunan kasus cemaran mikroba (%)	0.00	0.00	0.00
52	Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah	Jumlah kelompok tani	5.00	0.00	0.00
53	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis	21.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan	Jumlah pelaku usaha dalam kerjasama pemasaran	4.00	10.00	250.00
		Nilai transaksi kerjasama pemasaran	100.00	50.00	50.00
54	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara (Juta US\$)	1.50	0.50	33.07
	Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Jalan dan Jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%) (Panjang jalan untuk mendukung kawasan strategis dg kapasitas daya mampu diatas 10 Ton)	65.54	48.97	74.72
	Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP	Jumlah fasilitas transportasi darat, laut, udara dan ASDP yang terbangun (2017-2018)	1.00	1.00	100.00
55	Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang)	100.00	71.60	71.60
56	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah wisatawan (juta orang)	1.33	1.77	133.21
57	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan :	149,521.0	131,950.0	0.00
		Karet	128,740.0	115,160	89.45
		Kakao	10,096.0	7,778.0	77.04
		Lada	11,781.0	9,012.0	76.50
	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan kelapa sawit	19.00	16.69	87.84
		Produktivitas komoditas perkebunan karet	1.30	1.28	98.46
		Produktivitas komoditas perkebunan kelapa	0.68	0.80	117.65
		Produktivitas komoditas perkebunan kakao	0.77	0.50	64.94
		Produktivitas komoditas perkebunan lada	1.10	0.99	90.00



No.	Sasaran	Indikator (Impact)	Target Kinerja Impact	Realisasi Kinerja Impact	Kinerja
58	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Jumlah Kawasan Peternakan	25.00	0.00	0.00
		Peningkatan produksi daging	3.60	2.70	75.00
		Peningkatan produksi telur	3.30	2.16	65.45
		Produksi hijauan pakan ternak	34125.00	40775.00	119.49
59	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (juta USD)	16.24	22.82	140.56
60	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB (Triliun)	38,4	0.00	0.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan (%)	1.50	0.42	28.00
61	Program Peningkatan Produksi pertanian	jumlah produksi padi (GKG) (ton)	0.00	0.00	0.00
	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan	Jumlah Produksi Padi (GKG) [Ton]	320000.00	100540.00	31.42
62	Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)	Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha)	0.00	0.00	0.00
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan	Produktivitas Unggulan Padi (ton GKG)	4.50	4.00	88.89
63	Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan	985.00	1015.00	103.05
64	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas	Jumlah PPL Perikanan Berkualitas	120.00	0.00	0.00
65	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh	Jumlah BPP	140.00	4.00	2.86
66	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi	5.00	2.00	40.00
67	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas lahan pertanian yang terlayani (ha)	5050.00	6820.00	135.05
68	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Daerah	100.00	98.16	98.16
69	Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan	jumlah produksi daging (ton)	56.061,80	0.00	0.00
		1. Peningkatan populasi ternak (%) :	0.00	0.00	0.00
		'- Sapi (%)	6.00	2.86	47.67
		'- Kerbau (%)	5.00	0.18	3.60
		'- Kambing (%)	7.00	3.66	52.29
		'- Babi (%)	5.00	2.72	54.40
		'- Ayam Buras (%)	6.00	3.31	55.17
		2. Service per conception (S/C)	2.00	2.14	107.00
3. Produksi biogas yang dihasilkan (M3)	36.00	0.00	0.00		
	Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Usaha pengelolaan hasil	100.00	91.00	91.00
70	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	271.34	98.44	36.28
	Program Pengembangan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi budidaya	114.47	82.22	71.83
		Jumlah produksi engolahan hasil perikanan	66.00	32.21	48.80
71	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	163.09	77.12	47.28
72	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian	Jumlah Kawasan Pertanian	85.00	75.00	88.24
73	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	120.00	96.71	80.59
74	Program Diversifikasi Energi	% Bauran Energi Baru Terbarukan	3.00	0.00	0.00
		Persentase kapasitas produksi listrik yang dihasilkan dari sumber energi alternatif	1.50	1.89	126.00



No.	Sasaran	Indikator (Impact)	Target Kinerja Impact	Realisasi Kinerja Impact	Kinerja
75	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Instalasi Biogas (unit)	675.00	0.00	0.00
76	Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	80.00	84.07	105.09
77	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Rasio jumlah desa yang telah dialiri listrik	97.50	98.07	100.58
78	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%)	58.70	11.39	19.40
		Panjang jalan provinsi dengan kapasitas daya mampu 10 ton (km)	116.70	119.60	102.49
79	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan jalan (%)	90.00	51.66	57.40
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan jaringan irigasi wilayah I	Tingkat Kemantapan jalan wilayah I (%)	90.00	51.66	57.40
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan jaringan irigasi wilayah II	Tingkat Kemantapan jalan wilayah II (%)	90.00	51.66	57.40
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan jaringan irigasi wilayah III	Tingkat Kemantapan jalan wilayah III (%)	90.00	51.66	57.40
80	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Ketersediaan infrastruktur jalan (%)	100.00	65.91	65.91
		Ketersediaan infrastruktur jalan dg kapasitas daya mampu diatas 10 Ton (Km)	65.54	48.97	74.72
81	Program pembangunan jalan tol	Ketersediaan jalan tol (%)	42.23	73.78	174.71
		Ketersediaan Jalan Tol pada seksi 1 (Km)	22.50	16.29	72.40
82	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Kuantitas Komoditas (ton)	334,321,428	453,074,098	135.52
		Kuantitas Penumpang (orang)	16313548	2527986	15.50
	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Jumlah fasilitas transportasi darat, laut, udara dan ASDP yang terbangun (2017-2018)	1 pelabuhan maloy	1.00	100.00
83	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi	6.00	8.00	133.33
		Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana jalan dan jembatan	5.00	5.00	100.00
84	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyebangan	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebangan	6.00	6.00	100.00
85	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara	Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara	2.00	1.00	50.00
86	Program sarana dan prasarana telekomunikasi	Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi (%)	80.00	100.00	125.00
87	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	Kapasitas air baku (l/detik)	330.00	260.00	78.79
89	Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air	Persentase penyediaan air baku kawasan industri	40.00	15.32	38.30
		Persentase peningkatan jumlah bendungan untuk pengembangan irigasi dan air baku	25.00	25.00	100.00
90	Program pengendalian banjir	Luas genangan banjir (Ha)	405.00	418.00	103.21
91	Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis	0.00	0.00	0.00
92	Program penguatan kelembagaan PTSP	Menurunnya tingkat korupsi	7.00	0.00	0.00



No.	Sasaran	Indikator (Impact)	Target Kinerja Impact	Realisasi Kinerja Impact	Kinerja
93	Program pengembangan zona integritas	jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	5.00	1.00	20.00
		Terwujudnya Perangkat Daerah sebagai zona integritas	5.00	5.00	100.00
94	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Menurunnya kasus KKN	0.00	0.00	0.00
		Terwujudnya pencegahan dan pemberantasan KKN	0.00	0.00	100.00
95	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini laporan keuangan pemerintah provinsi	WTP	WDP	100.00
96	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP	1.00	50.00	5000.00
97	Program peningkatan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85.00	82.15	96.65
98	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur (%)	95.00	86.10	90.63
		Terwujudnya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur	95.00	81.24	85.52
99	Program integrasi aplikasi	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	20.00	10.00	50.00
100	Pengembangan data statistik dan spasial	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	92.00	68.54	74.50
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kinerja kantor	100.00	73.33	73.33
101	Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi	A (80)	BB (77.50)	96.94
102	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100.00
		% Kab/Kota yang memperoleh status sangat tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggaraan	80.00	55.56	69.45
103	Program Pendidikan politik masyarakat	Indeks demokrasi	75.00	72.86	97.15
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada	71.25	58.16	81.63
104	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	Jumlah KPH (unit)	18.00	8.00	44.44
105	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	200.00	13136.77	6568.39
	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS Prioritas yang dikelola secara terpadu (DAS)	11.00	8.00	72.73
106	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skor penyelenggaraan tata ruang	80.00	73.57	91.96
107	Program Rehabilitasi Hutan Mangrove	Luas penanaman (Ha)	400.00	40.00	10.00
		Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	0.00	0.00	0.00
108	Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi	Jumlah HCV dikawasan hutan (kawasan)	6.00	1.00	16.67
		Jumlah HCV dikawasan hutan	0.00	0.00	0.00
	Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi	50.00	73.37	146.74
109	Program Rehabilitasi Reklamasi lahan Pasca Tambang	% Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	40.00	54.23	135.58
110	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi yang diturunkan (%)	25.00	35.00	140.00
111	Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	300.00	298.00	99.33
112	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	82.00	82.00	100.00
		Persentase penurunan beban pencemaran	sedang / 5	5.00	100.00



No.	Sasaran	Indikator (Impact)	Target Kinerja Impact	Realisasi Kinerja Impact	Kinerja
113	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat adipura	10.00	2.00	20.00
114	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata	366.00	96.00	26.23

- b. Indikator Kinerja Prosentase pencapaian RKPd terhadap sasaran RPJMD tahun 2018 dimana Target adalah 95% dan realisasi kinerja 154.41% maka capaian indikator kinerja ini adalah 162.54%.
- c. Dengan capaian indikator melampaui sebesar 154.41% dari target, maka hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RPJMD pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang sangat baik.
- d. Perubahan Indikator RPJMD tahun 2018 dikarenakan ada perubahan RPJMD Tahun 2014-2018 tahun 2014 terkait dengan Pemekaran daerah Kaltim dan Kaltara, dan Kabupaten Mahulu, Perubahan RTRW Prov. Kaltim, Pelaksanaan RAD-GRK secara Internasional di negara-negara yang merupakan sumber O2 dikarenakan defisit O2 di dunia. Sehingga Perubahan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018 dilakukan melalui Perda nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.
- e. Indikator kinerja Prosentase Pencapaian RKPd terhadap Sasaran RPJMD dengan realisasi 2018 sebesar 154.41% lebih tinggi dari tahun 2017(121.64%), 2016(83.52), 2015(91.57). Tahun 2018 merupakan Tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018, dan disebabkan perubahan RPJMD 2013-2018 sehingga terdapat revisi beberapa indikator pada RPJMD 2013-2018.

**- Peningkatan/Penurunan**

- a. Indikator Kinerja Prosentase Pencapaian RKPd terhadap Sasaran RPJMD dengan target 95% dan realisasi kinerja 154.41% maka capaian indikator kinerja ini adalah 162.54%. Dapat dikatakan bahwa indikator ini adalah sangat tinggi.



- b. Indikator Kinerja Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD melakukan perbandingan terhadap realisasi guna pencapaian peningkatan dan penurunan tahun 2018, maka diperoleh peningkatan sebesar 655.4%.
  - c. Indikator Kinerja Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD untuk memperoleh tingkat kemajuan maka dilakukan perhitungan dimana realisasi tahun 2018 dibandingkan target akhir renstra maka diperoleh tingkat kemajuan sebesar 162.54.
- **Alternatif solusi**
- a. Penetapan indikator lebih memperhatikan data yang tersedia atau melakukan pendataan pada indikator yang ditetapkan serta kerjasama dengan BPS.

## **5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

*Monitoring* dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan

- Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN
- Laporan Tepra
- LKPJ Gubernur

### **A. Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018**

Diselenggarakan di Gedung DPRD Prov. Kaltim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018. Dalam LKPJ akhir Gubernur mengandung makna penyampaian informasi, capaian kerja pelaksanaan pemerintahan selama lima tahun serta bentuk tanggung jawab dalam memimpin Prov Kaltim selama tahun 2013-2018.

Berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Kalimantan Timur, maka Gubernur berkewajiban menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018. LKPJ-AMJ disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014.





Selanjutnya dengan mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kebijakan Pemerintahan Daerah
Bab III	Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab IV	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Bab V	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi
Bab VI	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Bab VII	Penutup

### **Kebijakan Pemerintah Daerah**

Pada pembahasan kebijakan pemerintah daerah memuat Visi dan Misi Pemerintah Daerah Prov. Kaltim. Memuat pula strategi dan arah kebijakan daerah. Serta Prioritas pembangunan selama lima tahun pemerintah daerah yang menetapkan 12 (dua belas) Prioritas Pembangunan (terlampir pada RPJMD).

### **Kebijakan Umum Keuangan Daerah.**

#### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Melalui kebijakan tersebut yang ditunjang dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan, diharapkan semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang ditandai dengan percepatan waktu pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

##### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.



- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Penerimaan Lain-Lain

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data obyek pajak yang sebenarnya.
2. Belum maksimalnya fungsi pengawasan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
3. Belum maksimalnya dukungan dan fungsi koordinasi antar instansi/unsur terkait dalam pengelolaan pendapatan.
4. Masih terdapat adanya kecenderungan Wajib Pajak yang menunda pembayaran daerah.
5. Pendataan dan penagihan belum konsisten dengan baik sehingga belum tergali secara optimal.
6. Belum optimalnya perolehan pendapatan yang bersumber dari Perusda.
7. Adanya pembatasan produksi batu bara yang berdampak pada penurunan sumber pendapatan dari sektor pertambangan.

Permasalahan pada Dana Perimbangan

Jenis Dana Perimbangan yang tidak mencapai target yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Penghasil PPh 21, Pph Badan antara lain disebabkan oleh Pemotongan dana transfer DBH PPh sebesar Rp.10,039,170,124.00 sebagai kompensasi lebih salur pada tahun 2013 dan penyerapan anggaran belanja honorarium pegawai yang tidak optimal.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan, terutama terkait dengan permasalahan khusus yang masih dihadapi tersebut, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target



penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Upaya terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  - b. Upaya terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- B. Pengelolaan Belanja Daerah
1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Anggaran dan Realisasi Belanja
  3. Aset Daerah
  4. Upaya dan Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah
    - a. Program Prioritas Dalam Bidang Keuangan
    - b. Regulasi
    - c. Evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Kaltim.
    - d. Terhadap kegiatan Evaluasi Rancangan APBD maupun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Kaltim yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
    - e. Kualitas pengelolaan keuangan daerah
    - f. Peringkat penyerahan evaluasi Rancangan APBD

### **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam rangka mengurai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ini, tentu tidak dapat lepas dari tinjauan terhadap capaian pelaksanaan



indikator kinerja dari setiap misi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018. Pencapaian indikator kinerja dari setiap misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi

Misi pertama ini dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan yaitu "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim" dan 5 (lima) sasaran yaitu (1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Meningkatkan Angka Melek Huruf, (3) Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, (4) Meningkatnya Angka Harapan Hidup, (5) Meningkatnya Pendapatan Perkapita.

**Tabel. 3.17**

**Capaian Periode 2013-2018**

**Sasaran Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi**

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2013	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.61	77.33	73.82	74.17	74.59	74.59*
2	Angka Melek Huruf (persen)	98.30	98.64	98.75	98.69	98.60	98.60*
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9.60	9.60	9.60	9.15	9.62	9.62*
4	Angka Harapan Hidup (tahun)	71.40	71.78	73.62	73.65	73.68	73.68*
5	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	44.65	47.52	61.17	50.27	50.65	50.65*

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Evaluasi Tahun Terakhir RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018, dan BPS Provinsi Kalimantan Timur.

\*: Tahun 2018 Data belum Release dari BPS. Data yang digunakan tahun sebelumnya

2. Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan

Misi kedua menekankan pada dua tujuan yaitu "Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat" dengan sasaran 1) Menurunnya tingkat kemiskinan, 2) Menurunnya Indeks Gini, 3) Menurunnya tingkat pengangguran, 4) Meningkatnya daya beli masyarakat dan tujuan kedua yaitu "meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau" dengan sasaran 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, 2) Meningkatnya kontribusi



sektor pertanian dalam arti luas, 3) Tercapainya swasembada beras, 4) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.

**Tabel 3.18**

**Capaian Periode 2013-2018**

**Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan**

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2013	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018
1	Tingkat Kemiskinan	6.06	6.42	6.23	6.11	6.19	6.19*
2	Tingkat Pengangguran	8.90	7.53	7.50	7.95	6.91	6.90
3	Tingkat Inflasi	9.65	7.66	3.80	3.39	3.15	2.60
4	Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)	649,850.00	653,700.00	11,020,000.00	11,230,000.00	11,355,000.00	11,355,000.00*
5	Indeks Gini (Gini Ratio)	0.36	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33
6	Pertumbuhan Ekonomi						
	- Migas	1.59	2.02	-1.46	-0.38	3.13	1.77
	- Non Migas	5.17	5.86	-1.63	-1.52	4.04	2.37
	- Non Migas & Non Batubara			4.14	1.52	5.24	6.54
7	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	6.50	6.24	7.34	8.06	7.96	8.00
8	Rasio Pemenuhan Beras	72.00	71.20	70.17	47.95	61.52	61.52*
9	Bauran Energi baru terbarukan	0.02	0.50	1.01	1.27	1.38	2.12*

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Evaluasi Tahun Terakhir RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

\*: Tahun 2018 Data belum Release dari BPS. Data yang digunakan tahun sebelumnya.

### 3. Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata

Misi ketiga menekankan pada tujuan "Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas". Adapun sasaran pembangunan infrastruktur adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar dengan indikator indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar yang merupakan ukuran umpan balik



untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi serta memberikan gambaran perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik pembangunan fisik maupun aspek manfaatnya

**Tabel 3.19**  
**Capaian Periode 2013-2018**  
**Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata**

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2013	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	5.00	5.90	6.21	6.70	7.00	7.00*

Sumber : Kajian Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. BAPPEDA Provinsi Kaltim Tahun 2018, RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Evaluasi Tahun Terakhir RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

\*: Tahun 2018 Data belum Release dari BPS. Data yang digunakan tahun sebelumnya.

4. Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan public

Misi keempat menekankan pada tujuan "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik" dengan tiga sasaran yaitu (1) Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (3) Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja.

Capaian sasaran pembangunan di misi keempat sebagian besar menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahwa opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2013 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di

**Tabel 3.20**  
**Capaian Periode 2013-2018**  
**Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik**

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2013	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018
1	Indeks Persepsi Korupsi	5.20	4.90	5.58	5.58	5.56	5.56*
2	Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP*
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	68 (Baik)	72.16 (Baik)	76.65 (Baik)	79.81 (Baik)	80.56	80.56*



4	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	70.75 (B+)	79.97 (B+)	75.14 (BB)	77.37 (BB)	77.49 (B+)	77.49 (B+)*
5	Kinerja Pemerintahan Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi*

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur \*) data tahun 2015, \*\*) data SKPD

\*: Tahun 2018 Data belum Release dari BPS. Data yang digunakan tahun sebelumnya.

5. Misi 5 : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim

Misi kelima ini menekankan pada tujuan "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup" dengan dua sasaran diantaranya adalah (1) Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup, (2) Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca. Capaian sasaran misi 5 pada kurun waktu tahun 2013-2018 untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim dengan pola pembangunan Kalimantan Timur yang masih mengekstrasi sumber daya alam, yang kita sadari adanya potensi penurunan pada kualitas lingkungan (baik untuk media air, lahan dan udara) yang terjadi.

**Tabel 3.21**  
**Capaian Periode 2013-2018**  
**Sasaran Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim**

No	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2013	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.07	75.24	78.29	83.19	82.64	82.64*
2	Intensitas Emisi	1,500	1,611	1,300	1,368	1,515	1,515*

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur data tahun 2018

\*: Tahun 2018 Data belum Release dari BPS. Data yang digunakan tahun sebelumnya.

**Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan**

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.



Realisasi pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diterima pada tahun 2014-2018 dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

A. Dasar Hukum Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

B. Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga.

1. Kementerian/Lembaga Pemberi Dekonsentrasi dan Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Alokasi dan Realisasi penyelenggaraan Dekonsentrasi yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 664.808.046.000 dengan realisasi sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2018 sebesar Rp.432.896.966.752 atau 65,12% yang bersumber dari APBN .

2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Dekonsentrasi yang diterima Perangkat Daerah (PD) ditingkat Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2018 sebanyak 82 program dan 364 kegiatan.

Program kegiatan melalui Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2015-2018 sampai dengan akhir bulan juni 2018 antara lain:

1. Program bina administrasi kewilayahan





2. Program pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum
3. Program Bina Pembangunan Daerah
4. Program Bina Pemerintahan Desa
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
7. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
9. Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura
10. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
11. Program peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian
12. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian
13. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan,
14. Program peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan
15. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan
16. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
17. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
18. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
19. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat



20. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21. Program Pendidikan Dasar dan Menengah
22. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
23. Program pencegahan dan pengendalian penyakit,
24. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
25. Program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
26. Program pembinaan kesehatan masyarakat
27. Program pembinaan pelayanan kesehatan
28. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
29. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
30. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
31. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
32. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
33. Program Pendidikan Menengah
34. Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,
35. Program pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan
36. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
37. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
38. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
39. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
40. Program Pelestarian Budaya
41. Program pemberdayaan sosial



42. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
43. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
44. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
45. Program penanganan fakir miskin
46. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
47. Program pengelolaan perikanan tangkap
48. Program pengelolaan perikanan budidaya
49. Program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
50. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan Lain Lain

### **Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, menjelaskan tugas umum pemerintahan (TUP) merupakan tugas kepala daerah provinsi, dan kabupaten/kota di luar pelaksanaan azas desentralisasi dan azas pembantuan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi:

#### **A. Kerjasama antar daerah;**

Kerjasama antar daerah diutamakan untuk meningkatkan sinergitas antar daerah baik secara lokal, regional maupun internasional, mengoptimalkan potensi dan pelaksanaan pembangunan, memperkecil kesenjangan dan mencegah konflik, serta meningkatkan konektivitas kewilayahan :

Pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dari capaian implementasi kesepakatan kerjasama sesuai dengan



tujuan dan target yang telah ditetapkan. Beberapa kesepakatan dan hasil kegiatan kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2014-2018 (terlampir pada Dok. Laporan LKPJ Akhir Gubernur Kaltim 2013-2018).

Permasalahan dan Solusi:

Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah masih ditemui beberapa permasalahan antara lain :

1. Pemahaman tentang kerjasama dari satuan kerja yang melaksanakan kerjasama sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
2. Adanya ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama daerah dengan peraturan perundang-undangan sektoral.
3. Kurang memadainya jumlah aparatur pengelola kerjasama baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemeirntah Kabupaten/ Kota.
4. Belum tersusunnya rencana induk kerjasama antar daerah yang terintegrasi sehingga menjadi pedoman seluruh komponen untuk melakukan kerjasama antar daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota belum mengidentifikasi potensi masing-masing daerah secara optimal yang berpotensi untuk dikerjasamakan, baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pihak Ketiga (Dalam maupun Luar Negeri).

Beberapa solusi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SKPD tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah
2. Menyusun peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tentang aturan dan mekanisme kerjasama yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan kerjasama antar daerah



3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan kerjasama antara daerah melalui diklat dan pelatihan.
4. Menyusun rencana induk kerjasama antar daerah yang akan menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh SKPD untuk melaksanakan kerjasama.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota menggali lebih dalam dan menganalisa potensi masing-masing daerah, sehingga mampu melaksanakan kerja sama dalam rangka mensejahterakan rakyat.

B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah melalui upaya peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik.

Adapun kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2013-2018. Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2013-2018 tercantum pada laporan LKPJ akhir Gubernur Kaltim

Permasalahan dan solusi

Dalam pelaksanaan Kerjasama daerah dengan pihak ketiga masih ditemui beberapa permasalahan antara lain :

1. Masih belum ada kerjasama *sister province*
2. Masih belum tersedianya kajian mendalam tentang potensi daerah dan asset daerah yang perlu dikembangkan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri.
3. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman kerjasama dengan pihak ketiga baik oleh pemerintah daerah maupun oleh



pemerintah pusat termasuk kementerian / lembaga di tingkat pusat dan daerah.

Beberapa solusi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Perlu melakukan penjajakan ke negara yang memiliki kesamaan untuk dikerjasamakan, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri
2. Perlu dibuat analisis mendalam terkait potensi daerah dan desain teknis pengembangan aset-aset daerah.
3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap proses pelaksanaan kerjasama melalui sosialisasi, bimtek maupun transfer pengetahuan dengan pihak-pihak lain.

C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;

Kerjasama koordinasi pertikal dilaksanakan oleh pemerintah Prov. Kaltim periode 2014-2018 diantaranya Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Komando Daerah Militer VI Mulawarman, yang menghasilkan pada Bidang Sarana Prasarana Umum. Kerjasama Pada Bidang Pembangunan Infrastruktur untuk tahun 2014, yang menghasilkan pada kegiatan Pembangunan Jalan Long Bagun-Long Pahangai dan Long Apari. Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tentara Angkatan Darat di Bidang Lanjutan Pembangunan 3 (tiga) Bandara dan Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan dan koordinasi lainnya yang terlampir pada LKPJ akhir Gubernur Kaltim

D. Pembinaan batas wilayah;

Administrasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 Kabupaten dan 3 Kota, 103 Kecamatan, 196 Kelurahan dan 836 Desa.

Perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami perkembangan sangat pesat, namun perlu diikuti dengan penyelesaian penegasan batas dan penataan wilayah



administrasi. Pada kurun waktu tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan batas wilayah Provinsi, serta penataan wilayah, sebagai berikut :

1. Penegasan Batas Daerah
2. Pemasangan Pilar Batas Utama
3. Pembakuan nama Rupabumi
4. Penataan wilayah

#### Permasalahan

1. Sampai dengan tahun 2018 Kalimantan Timur masih menyisakan 3 sengketa batas wilayah dengan Provinsi lain yaitu :
  - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan batas laut yaitu pada ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Mamuju.
  - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara.
  - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Utara pada ruas batas antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan.
2. Untuk wilayah antar Kabupaten/Kota masih menyisakan 4 sengketa batas wilayah, yaitu :
  - Kabupaten Kutai Barat – Kabupaten Mahakam Ulu pada ruas batas antara Kecamatan Long Iram, Kecamatan Linggang Bigung dengan Kecamatan Long Hubung.
  - Kabupaten Paser – Kabupaten Penajam Paser Utara pada ruas batas antara Kecamatan Long Kali dengan sebagian Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam dan sebagian Kecamatan Sepaku.



- Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda pada ruas batas dari Gunung Batu Biru Kecamatan Tenggarong Seberang sampai Gunung Putang Kecamatan Samarinda Utara.
  - Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur di ruas batas Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Batu Putih dengan Kecamatan Karang, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran.
3. Sehubungan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana untuk pemekaran daerah tidak lagi langsung menjadi Daerah Otonom Baru melainkan melalui tahapan daerah persiapan, sehingga sebagai pedoman tindak lanjut adanya revisi untuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Namun hasil revisi Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum diterbitkan sehingga Pemerintah dan DPR RI masih menunggu hasil revisi tersebut untuk mengambil langkah selanjutnya untuk menetapkan daerah persiapan tersebut.
  4. Dalam melakukan pemasangan Tugu Nama Pulau kondisi alam seringkali menjadi kendala untuk menjangkau lokasi kegiatan.

#### Solusi

1. Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi Pemerintah Provinsi untuk penyelesaian sengketa batas dengan Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur.
2. Meningkatkan upaya fasilitasi dan pertemuan Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kesepakatan terhadap penyelesaian batas wilayah, dengan mengutamakan





kepentingan bersama, prinsip keadilan yang mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Persyaratan yang sudah dirampungkan tetap mengacu pada aturan yang lama karena sudah melalui proses yang panjang sebelum terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014.
4. Penegasan batas daerah tetap harus dilakukan terutama pada daerah-daerah rawan konflik dan daerah-daerah potensial.

E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;

1. Bencana Yang terjadi dan penanggulangannya
2. Sumber dan jumlah anggaran yang tersedia guna melaksanakan penanganan bencana dan penanggulangannya berasal dari APBD dan APBN periode 2014-2018.
3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana yang dilaksanakan :
  - c. Monitoring daerah rawan bencana
  - d. Monitoring alat deteksi dini longsor dan banjir
  - e. Melaksanakan Pembekalan Penanggulangan Bencana Untuk Wartawan lingkup Kalimantan Timur
  - f. Pembuatan Desa/Kelurahan tangguh bencana
  - g. Monitoring evaluasi desa tangguh bencana
4. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

F. Pengelolaan kawasan khusus

1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota. Terlampir pada LKPJ akhir Gubernur Prov Kaltim periode 2014-2018.



2. Sumber anggaran

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung perencanaan Kawasan Khusus KEK MBTK berupa Penyempurnaan Materi Teknis dan Penyusunan Ranperda RTR KIO Maloy yang dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2017 dengan sumber anggaran APBD Provinsi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, pada kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.

3. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

- Telah dilakukan asistensi dan supervisi peta dasar kepada Badan Informasi Geospasial (BIG), namun masih perlu dilakukan penyempurnaan kembali untuk mendapat persetujuan teknis dari BIG.
- Masih terdapat NSPK dan kebijakan nasional terbaru yang belum terakomodir di RTR KSP KI Oleochemical Maloy.

4. Solusi

Beberapa solusi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Perlu melakukan penyempurnaan peta dasar serta melakukan asistensi dan supervisi peta dasar kembali kepada BIG untuk mendapatkan persetujuan peta.
- Perlu melakukan penyesuaian dokumen RTR KSP terhadap NSPK Penataan Ruang dan kebijakan Nasional terbaru.

G. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

1. Gangguan yang Terjadi Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya).

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2014-2018, terdapat 104 potensi konflik, dengan perincian sebagai berikut : Unjuk Rasa Ekonomi 15 konflik, Unjuk Rasa Politik 11 konflik, Unjuk



Rasa Sosial 39 konflik, Unjuk Rasa Budaya 1 konflik, Unjuk Rasa Pendidikan 2 konflik, Unjuk Rasa Hukum 32 konflik, Agama 3 konflik, Hankam 1 konflik dan tapal batas 0 konflik,

2. Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka optimalisasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Jumlah ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 178 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 83 orang dan pegawai non PNS sebanyak 95 orang.

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Jumlah ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 178 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 83 orang dan pegawai non PNS sebanyak 95 orang.

5. Kendalanya

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain :

- a. Kurangnya Koordinasi, Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah salah satu indikator



pelaksanaan urusan Kentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah penegakan peraturan daerah. Sementara Peraturan daerah tersebut terdapat pada dinas dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan masing-masing yang menjadi urusannya, disisi lain Perangkat Daerah Polisi Pamong Praja bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah. Kondisi tersebut diperlukan komitmen bersama untuk menegakkan perda yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- b. Sumber Daya Manusia kurang memadai. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga dijelaskan yang berperan dalam penegakan perda adalah : Jabatan Fungsional Polisi pamong Praja dan Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kondisi sekarang Satuan polisi Pmong Praja Provinsi Kalimantan Timur belum ada yang menjabat Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, serta baru memiliki 4 orang PPNS yang masih belum mempunyai pengalaman penanganan kasus.

#### 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, maka status kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.



Polisi Pamong Praja dilibatkan membantu aparat keamanan dalam mengamankan proses Penanggulangan Ketentraman dan ketertiban umum terutama terhadap aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Disamping hal di atas, Polisi Pamong Praja melalui Sekretariat PPNS Daerah Prov Kaltim melakukan pembinaan PPNS lingkup SKPD Provinsi bersinergi melakukan penegakan Perda dan membantu administrasi pelantikan atau pengukuhan PPNS Daerah Prov. Kaltim dan Kabupaten Kota.

## **B. Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD**

- **Laporan Triwulan Evaluasi RENJA SKPD dan Laporan semester RKPD Kab/Kota**
- **Dokumen Evaluasi RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya memiliki satu tahun periode pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam RKPD juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai pijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan lanjutan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik dan optimal. RKPD, pada dasarnya, berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahapan tahunannya. Oleh karena itu, penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi,



kondisi, dan kebutuhan terkini. Pelaksanaan RKPD 2018 perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;
2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; serta
4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

bagai penjabaran dari pelaksanaan Revisi RPJMD tahun terakhir, maka RKPD tahun 2018 merupakan satu-satunya dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada dokumen Revisi RPJMD Kalimantan Timur tahun 2013-2018. RKPD tahun 2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Selanjutnya, rumusan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2018 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018. Selain itu, RKPD tahun 2018 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD tahun 2018, yaitu:

- a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;

- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018;
- c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.

- **TEPRA Provinsi Kalimantan Timur**

Realisasi penyerapan anggaran yang masih belum maksimal menjadi latar belakang dibentuknya Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) oleh Presiden pada tahun 2015. Diharapkan dengan penyerapan anggaran yang tepat dan cepat, sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pemerintahan.

Salah satu instrumen pendukung dalam mekanisme evaluasi penyerapan anggaran secara nasional adalah ketersediaan format pelaporan TEPRA (form A sampai G) yang mencakup seluruh kebutuhan informasi pelaporan penyerapan anggaran di Pusat dan Daerah.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengembangkan format pelaporan TEPRA tersebut yang berbasis internet/web aplikasi sebagai sebuah kebutuhan dan keharusan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat lebih mempermudah dan mempercepat proses pelaporan kegiatan pembangunan yang dilaporkan secara rutin setiap bulannya ke Pusat.

Data pelaporan TEPRA bersumber dari seluruh Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat data realisasi bulanan (keuangan dan fisik) paket

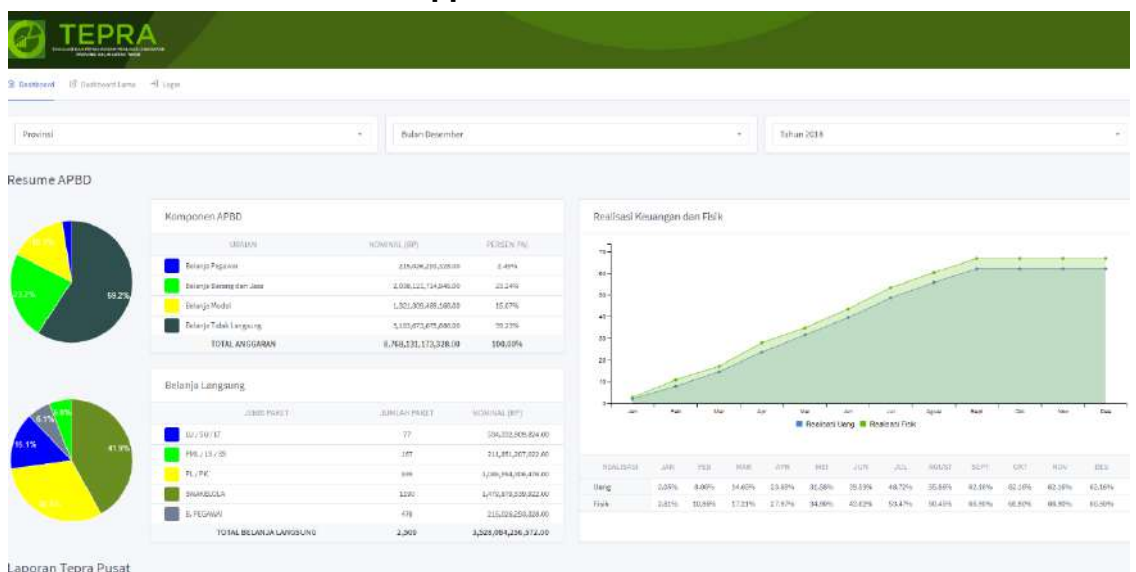


pekerjaan yang berada didalam program/kegiatan yang dijalankan. Data TEPPRA saat ini telah digunakan pula dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD di Provinsi Kalimantan Timur.

Upaya optimalisasi yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan pengembangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berupa pengintegrasian dengan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) serta *BridgeSys* dan Simda Keuangan. Dan sejak tahun 2016, TEPPRA juga telah menjalin kerjasama dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam rangka monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

TEPPRA dapat diakses secara online melalui alamat <http://teppa.kaltimprov.go.id>

**Grafik III. 5**  
**TEPPRA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**



TV Monitor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Web aplikasi yang digunakan sebagai media publikasi dan penyampaian data realisasi anggaran APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur setiap bulannya yang bersumber dari data laporan Tim Pengawasan dan Realisasi Anggaran (TAPD).





Web aplikasi TV Monitor ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya dalam rangka optimalisasi upaya keterbukaan informasi publik secara lebih luas.

Dalam web aplikasi TV Monitor ini terdapat informasi berupa Struktur Anggaran APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jumlah Program Kegiatan dan Paket Pekerjaan yang dijalankan dalam satu tahun anggaran, Gambaran perkembangan realisasi anggaran APBD, Gambaran perkembangan pelaksanaan paket pekerjaan umum dan strategis yang dijalankan, serta Grade realisasi anggaran Perangkat Daerah.

Web aplikasi TV Monitor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diakses secara online melalui alamat

<http://tvmonitor.bappedakaltim.com/monitor>

- **Evaluasi RENJA – PD (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Setelah disusun, maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD tersebut secara rutin setiap triwulan dalam satu tahun anggaran guna menjaga konsistensi program serta sinkronisasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan RKPD tersebut merupakan tugas dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Mekanisme yang dijalankan dalam melakukan pengendalian dan



evaluasi tersebut bersumber dari data pelaporan Rencana Kerja (Renja) yang dijalankan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Seiring dengan perkembangan informasi teknologi dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan langkah inovasi berupa pengembangan sistem aplikasi evaluasi Renja-PD (RKPD) pada Tahun 2018. Aplikasi ini diharapkan dapat meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menghimpun laporan dari seluruh Perangkat Daerah, serta memudahkan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dan pengampaian laporan kepada Pemerintah Pusat (Kemendagri).

Format pelaporan yang ditampilkan pada aplikasi ini telah disesuaikan dengan format pelaporan (pengendalian dan evaluasi RKPD) yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam Permendagri 54 Tahun 2010. Aplikasi Evaluasi Renja-PD telah terintegrasi dengan data pada aplikasi SIPPD dan BridgeSys. Aplikasi Evaluasi Renja-PD dapat diakses secara online melalui alamat <http://evaluasi.portal-kaltim.com>

**Gambar III. 6**  
**Evaluasi RENJA – PD (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur**

#	Program Prioritas	Rata-rata Capaian Kinerja RENJTRA (%)	#	Beban	Target	Tahun		Hasil Capaian 2017	#	Prioritas Pendanaan
						2017	2018			
			1	Meningkatnya IPM	- IPM	76,71	77,01	77,45		Tanpa Capaian
1	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	0			- Angka Melewi Huruf	95,90 %	98,80 %			
2	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0								
3	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	0								
4	Program Penjelajagan Perbatasan Ruang	0								
5	Program pendidikan politik masyarakat	0								
6	Program Pengembangan Kemiskinan bidang Peninggalan Berencana	0								
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	0								
8	Program Pengembangan Kelembagaan Kompetitif	0								
9	Program pemberdayaan penyuluh pertanian terpadu	0								

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya,



pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi

**Tabel III.22**

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	135.156%	98.80%	36.36%

Berdasarkan data efisiensi penggunaan sumberdaya pada sasaran satu tercapainya integrasi dan sinkronisasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran bahwa :

- a. Indikator kinerja Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dimana persentasi capaian kinerja sebesar 135.156% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98.80% maka tingkat efisiensi yang dicapai adalah 36.36%, menggambarkan bahwa kinerja ini efisien perencanaan terhadap anggaran.

**D. Realisasi Anggaran**

Sub bab menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

**1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja**

**Tabel III.23**

**Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	96.33%	90.91%	94.28%	7,215,400,000	6,550,747,118	90.79%



No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	97.50%	98.64%	105.47%	8,943,510,000	8,600,167,927	96.16%
3	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	90.00%	111.76%	135.16%	2,564,260,000	2,517,754,467	98.19%

Dari Tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran strategis baik kinerja dan anggaran :

- a. Sasaran Pertama Tercapainya integrasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran dimana target kinerja 96.33% dengan realisasi kinerja 90.91% maka prosentase pencapaian kinerja adalah 90.79%  
Pada alokasi anggaran Rp.7,215,400,000,- dengan realisasi Rp.6,550,747,118,- maka prosentase capaian anggaran adalah 97%.
- b. Sasaran Kedua Tercapainya Kualitas Data/informasi dan spasial serta fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunan daerah dimana target kinerja 97.50% dengan realisasi kinerja 98.64% maka prosentase pencapaian kinerja 105,47%.  
Pada alokasi anggaran Rp.8,943,510,000,- dengan realisasi anggaran Rp.8,600,167,927 maka prosentase capaian anggran 96.16%.
- c. Sasaran Ketiga Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dimana target kinerja 90.00% dengan realisasi kinerja 111.76% maka prosentase pencapaian kinerja 135.16%. Pada alokasi anggaran Rp.2,564,260,000 dengan realisasi anggaran Rp.2,517,754,467,- maka prosentase capaian anggran 98.19%.

## 2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2018 BAPPEDA Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp. 42,638,377,000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.14,178,107,000.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 28,934,660,000,00 Pada perubahan APBD 2018 anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim menjadi



Rp.47,458,683,228,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.13,703,717,000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13,703,717,000,00.

**Tabel III.24**

**Realisasi Anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2018**

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,703,717,000	12,885,873,682	94.03%
2	BELANJA LANGSUNG	33,754,966,228	31,905,086,408	94.52%
	<b>TOTAL</b>	<b>47,458,683,228</b>	<b>44,790,960,090</b>	<b>94.38%</b>

**Tabel III.25**

**Realisasi Anggaran Tahun 2018 per Program/Kegiatan**

No	Program /kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	Persentase	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>6,232,850,000</b>	<b>5,684,023,343</b>	91.19%	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	6,232,850,000	<b>5,684,023,343</b>	91.19%	
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>5,403,290,228</b>	<b>5,247,904,521</b>	97.12%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	2,569,459,528	2,519,365,548	98.05%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	2,833,830,700	2,728,538,973	96.28%	
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>3,509,906,000</b>	<b>3,348,595,724</b>	95.40%	
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	3,459,906,000	3,299,568,024	95.37%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	49,027,700	98.06%	
4	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>290,400,000</b>	<b>284,357,665</b>	97.92%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	212,000,000	206,014,465	97.18%	



No	Program /kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	Persentase	
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	78,400,000	78,343,200	99.93%	
5	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>2,032,000,000</b>	<b>1,803,862,593</b>	88.77%	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	773,800,000	763,770,527	98.70%	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	622,000,000	615,728,971	98.99%	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	636,200,000	424,363,095	66.70%	
6	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2,564,260,000</b>	<b>2,517,754,467</b>	98.19%	
	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	1,710,260,000	1,698,635,326	99.32%	
	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	854,000,000	819,119,141	95.92%	
7	<b>Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	<b>2,405,000,000</b>	<b>2,328,478,266</b>	96.82%	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	592,300,000	589,049,251	99.45%	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	643,400,000	629,145,490	97.78%	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	1,169,300,000	1,110,283,525	94.95%	
8	<b>Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah</b>	<b>2,200,000,000</b>	<b>2,112,484,554</b>	96.02%	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	1,129,500,000	1,056,411,562	93.53%	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	593,100,000	587,944,028	99.13%	



No	Program /kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	Persentase	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	477,400,000	468,128,964	98.06%	
9	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>7,215,400,000</b>	<b>6,550,747,118</b>	90.79%	
	Penyusunan Rancangan RKPD	910,000,000	839,002,834	92.20%	
	Penyusunan RPJMD	2,550,000,000	2,026,454,822	79.47%	
	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	1,105,000,000	1,076,360,077	97.41%	
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	170,000,000	147,861,000	86.98%	
	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	1,799,000,000	1,789,147,260	99.45%	
	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	681,400,000	671,921,125	98.61%	
10	<b>Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial</b>	<b>1,942,250,000</b>	<b>1,903,567,068</b>	98.01%	
	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	1,375,450,000	1,348,563,578	98.05%	
	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	566,800,000	555,003,490	97.92%	

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018 disusun berdasarkan Renstra Bappeda Prov. Kaltim serta Penetapan Kinerja tahun 2018 dalam rangka perwujudan *good governance* yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun Anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2014 – 2018. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Kaltim tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbandingan Indikator Kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	99%	100.00%	<b>101.01%</b>
2	Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	95%	44.78%	<b>47.14%</b>
3	Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD	95%	100.00%	<b>105.26%</b>
4	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	100%	105%	<b>105%</b>





NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
				INDIKATOR KINERJA
5	Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	95%	115%	121.05%
6	Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	90%	121.64%	135.156%

2. Perbandingan Indikator Kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018
			2016	2017	2018	
1	Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	%	100	100	100	0
2	Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	%	32.18	72.73	54.06	-374.2
3	Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD	%	100	100	100	0.00
4	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	70.81	85	105	400
5	Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	%	100	108.11	115	137.8
6	Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD	%	83.52	121.64	154.41	655.4

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase RKPD terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD	%	99	100.	1.01
2	Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	%	95	44.78	47.14



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
3	Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPd	%	95	100.	105.26
4	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	%	100	105.00	105.00
5	Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	%	95	115	121.05
6	Prosentase Pencapaian RKPd terhadap Sasaran RPJMD	%	95	154.41	162.54

#### 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi	
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran	Prosentase RKPd terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPd	101.01%	90.79%	10.22%
		Jumlah usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat	47.14%	86.98%	-39.84%
		Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPd	105.26%	99.45%	5.81%
2	Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	105.00%	98.01%	6.99%
		Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan	121.05%	95.65%	25.40%
3	Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	Prosentase Pencapaian RKPd terhadap Sasaran RPJMD	162.537%	98.19%	64.35%

Sasaran pertama Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran:

- a. Kinerja Prosentase RKPd, terhadap RPJMD, Renstra terhadap RPJMD dan Renja terhadap RKPd dengan Target 99% dan realisasi 100% diperoleh capaian sebesar 101.01%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 dengan nilai adalah 0. Untuk tingkat kemajuan tahun 2018 terhadap target



akhir RPJMD adalah 101.01%. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara mengurangi persentasi capaian kinerja 101.01% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90.79% sehingga tingkat efisiensi yang diperoleh 10.22%, atau efisien.

- b. Kinerja jumlah usulan APBN di kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh pusat dengan target 95% dan realisasi 44.78% dan capaian sebesar 47.14%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 dengan nilai penurunan sebesar 559%. Sedang tingkat Kemajuan indikator kinerja ini diperoleh dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran dengan target akhir renstra maka diperoleh nilai sebesar 47.14%. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara mengurangi antara persentasi capaian kinerja 47.14% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 86.98% tingkat efisiensi yang diperoleh 39.84, atau dengan kata lain kegiatan ini tidak efisien.
- c. Indikator Kinerja Prosentase kesesuaian DPA dengan RKPD dimana target adalah 90% realisasi sebesar 100% dan capaian 105.26%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 dengan nilai 0, dengan kata lain indikator kinerja ini tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat Kemajuan indikator diperoleh dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan Target akhir renstra dan diperoleh nilai sebesar 105.26%. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara mengurangi antara persentasi capaian kinerja 105.26% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99.45% maka tingkat efisiensi yang diperoleh 5.81%, atau dengan kata lain kegiatan ini efisien.

Sasaran kedua Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah :

- a. Indikator Kinerja Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan dengan target 100% realisasi 105% maka capaian kinerja adalah 105%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 mengalami peningkatan 400%. Tingkat Kemajuan indikator diperoleh dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target akhir renstra dan diperoleh nilai sebesar 105%. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara



mengurangkan antara persentasi capaian kinerja 105% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98.01% maka tingkat efisiensi yang diperoleh 6.99%, atau dengan kata lain kegiatan ini efisien

- b. Indikator Kinerja Prosentase koordinasi perencanaan pembangunan dengan target 95% realisasi 115% maka capaian kinerja adalah 121.05%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 mengalami peningkatan 137.8%. Tingkat Kemajuan indikator diperoleh dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target akhir renstra dan diperoleh nilai sebesar 121.05%. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara mengurangkan antara persentasi capaian kinerja 121.05% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 95.65% maka tingkat efisiensi yang diperoleh 25.40%, atau dengan kata lain kegiatan ini efisien.

Sasaran ketiga Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur :

- a. Indikator Kinerja Prosentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD dengan target 95% realisasi 154.41% maka capaian kinerja adalah 162.05%. Pencapaian nilai Persentase peningkatan/penurunan tahun 2018 mengalami peningkatan 655.4%. Tingkat Kemajuan indikator diperoleh dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target akhir renstra dan diperoleh nilai sebesar 162.54%. Tingkat efiesi diperoleh dengan cara mengurangkan antara persentasi capaian kinerja 162.537% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98.19% maka tingkat efisiensi yang diperoleh 64.35% atau dengan kata lain kegiatan ini efisien.